HARIAN ACEH INDONESIA

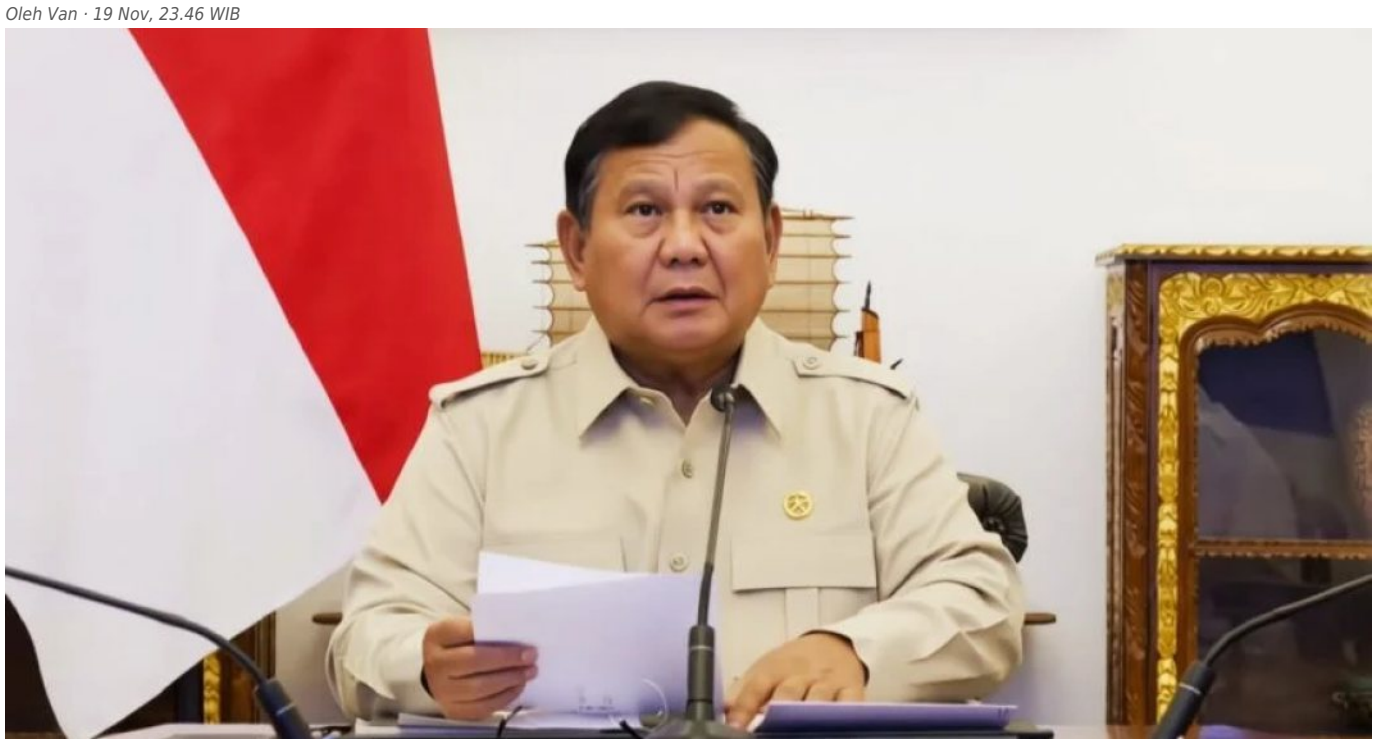
TEBAL
31 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 17

NASIONAL

Prabowo Bakal Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Bambang Pacul Dapet Kode

Oleh Van · 19 Nov, 23.46 WIB



JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI pada Rabu, 25 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, setelah rapat perdana paniti terkait pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Bambang.

Ia menyebut waktu penyerahan masih belum ditentukan. Namun, Prabowo diperkirakan datang langsung untuk menyerahkan dua nama tersebut kepada pimpinan MPR.

MPR Siapkan Penyambutan Prabowo

Bambang mengatakan pimpinan MPR akan menyambut kedatangan Prabowo dengan penuh kehormatan. Pimpinan fraksi dan alat kelengkapan MPR juga akan turut hadir dalam agenda tersebut.

"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat, ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, kompletlah.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 23
Aneka Berita 27

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar, Disebut sebagai 'Buah Tangan Senior ke Junior'



JAKARTA — Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional biro travel Pesona Mozaik, Nur Faudzin alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan saat Gus Alex menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Beri Apresiasi ke Dasco



JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Pembahasan regulasi tersebut disebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam keterangan resminya Kamis, (19/11/2026) mengatakan pengesahan dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB.

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

IPS Aceh Barat Tembus 2,99, Raih Predikat Baik



MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik berdasarkan hasil akhir Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hasil evaluasi sebelumnya.

Selengkapnya di halaman 23 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sri Radjasa Bongkar Dugaan Peran Listyo Sigit dalam Lengsernya Airlangga, Ini Respon Golkar!



BANDA ACEH - Praktisi intelijen Sri Radjasa mengungkap dugaan keterlibatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses pergantian kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia.

Ia mengklaim, Listyo Sigit diduga ikut diperankan dalam komunikasi melalui video call ketika Bahlil memanggil sejumlah Ketua DPD Golkar tingkat I …

Selengkapnya di halaman 3 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

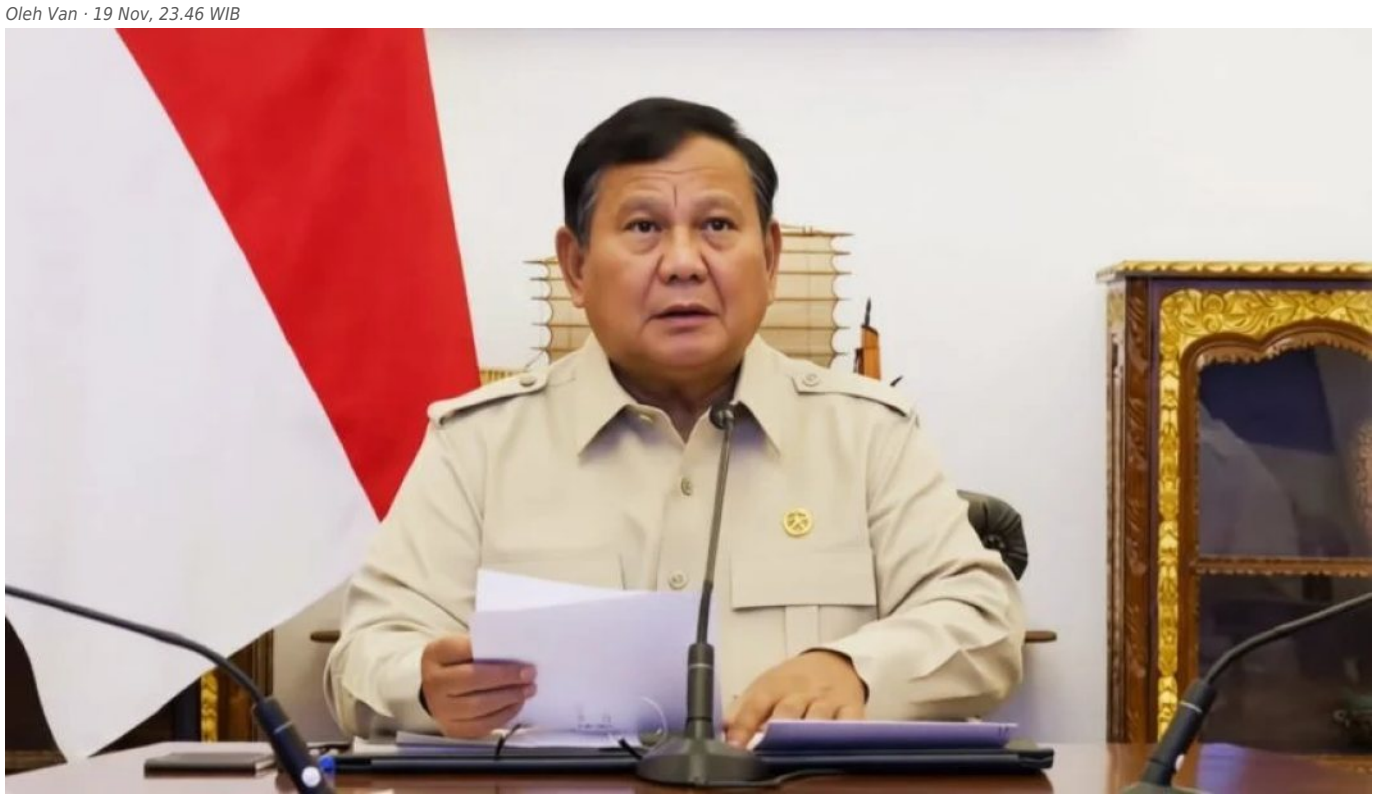
NASIONAL

44 BERITA

NASIONAL

Prabowo Bakal Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR, Bambang Pacul Dapet Kode

Oleh Van · 19 Nov, 23.46 WIB



JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI pada Rabu, 25 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, setelah rapat perdana panitia terkait pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

"Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan," kata Bambang.

Ia menyebut waktu penyerahan masih belum ditentukan. Namun, Prabowo diperkirakan datang langsung untuk menyerahkan dua nama tersebut kepada pimpinan MPR.

MPR Siapkan Penyambutan Prabowo

Bambang mengatakan pimpinan MPR akan menyambut kedatangan Prabowo dengan penuh kehormatan. Pimpinan fraksi dan alat kelengkapan MPR juga akan turut hadir dalam agenda tersebut.

"Kami semua akan menerima di ruang delegasi, di ruang rapat, ruang rapat gabungan itu dengan kehormatan penuh. Pakai jas, pakai dasi, kompletlah. Bukan hanya pimpinan MPR, tapi kami akan didampingi oleh pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dewan MPR. Alat kelengkapan majelis tepatnya," ungkapnya.

Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR RI, Benny K Harman, turut menyampaikan informasi mengenai rencana penyerahan tersebut. Ia menyebut Prabowo akan datang langsung ke MPR pada tanggal yang sama.

"Ya tanggal 25 itu ke pimpinan majelis ke panitia Ad Hoc. Tanggal 25 itu Bapak Presiden bakal menyerahkan dua nama itu ke pimpinan majelis," kata Benny.

"Saya mendapatkan informasi begitu, bapak presiden akan datang sendiri tanggal 25. Belum tahu belum tahu (waktunya) ini masih informasi awal," imbuhnya.

MPR Proses Pengisian Jabatan Wapres

Penyerahan dua nama tersebut merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026.

MPR sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk kemudian diverifikasi oleh tim yang dibentuk lembaga tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengajuan dua nama merupakan salah satu keputusan rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima Rp 1,3 Miliar, Disebut sebagai 'Buah Tangan Senior ke Junior'

Oleh Van · 19 Nov, 23.35 WIB



Seorang pria mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK saat berada di bawah pengawalan petugas.

JAKARTA — Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex mengaku menerima uang sebesar USD 75 ribu atau sekitar Rp 1,3 miliar dari staf operasional biro travel Pesona Mozaik, Nur Faudzin alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan saat Gus Alex menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, Gus Alex menyebut uang itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dari senior kepada junior, sementara total pemberian yang dibahas mencapai USD 85 ribu.

Jaksa KPK Greafik Loserte kemudian mengonfirmasi catatan penerimaan uang dari Pesona Mozaik kepada Gus Alex.

"Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik, kan begitu?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Alex.

Cerita Pemberian Uang dari Pesona Mozaik

Gus Alex menjelaskan, uang tersebut diberikan dalam dua tahap. Pemberian pertama berlangsung sekitar Juni 2023, menjelang keberangkatannya ke Arab Saudi untuk menjalankan tugas penyelenggaraan ibadah haji.

Saat itu, Nanang bersama Muis Ali Murtadho datang ke rumahnya membawa dua amplop berisi uang USD 45 ribu.

Satu amplop berwarna cokelat berisi uang untuk Gus Alex, sedangkan amplop putih berisi USD 10 ribu yang disebut sebagai titipan untuk Rizky Fisa Abadi.

Ketika mempertanyakan maksud pemberian tersebut, Gus Alex mengaku Muis menyebut uang itu sebagai pemberian dari senior kepada junior.

"'Mas, ini apa?', 'Ini dari senior untuk junior'," kata Alex menirukan percakapannya dengan Muis.

"Terus terang saya terima uangnya," lanjutnya.

Gus Alex mengaku kemudian membawa uang USD 10 ribu ke Kementerian Agama dan menyerahkannya kepada Rizky pada hari yang sama.

Ia mengatakan Rizky menerima amplop tersebut dan mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan ruangannya.

Setelah pelaksanaan ibadah haji 2023 selesai, Nanang kembali datang dan menyerahkan uang USD 40 ribu sehingga total uang yang diterima Gus Alex mencapai USD 75 ribu.

Gus Alex Sebut Uang Telah Dititipkan ke KPK

Dalam persidangan, Gus Alex menyatakan tidak pernah meminta ataupun menuntut uang dari pihak Pesona Mozaik.

"Saya tidak pernah minta apa-apa," ujarnya saat menjelaskan alasan menerima pemberian tersebut.

Ia mengaku memahami uang itu sebagai bentuk ucapan terima kasih dan menyebut telah menitipkan seluruh USD 75 ribu yang diterimanya ke rekening penampungan KPK pada Agustus 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Guru Besar IPDN Sebut yang Bisa Perintah Listyo hanya Jokowi, No Doubt!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 23.04 WIB

BANDA ACEH - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ryaas Rasyid melontarkan pernyataan tajam terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Ia menduga ada pihak yang lebih tinggi di atas Listyo Sigit dan memiliki pengaruh untuk memerintahkan operasi tersebut.Ryaas secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang menurut analisisnya paling mungkin memiliki pengaruh terhadap Listyo Sigit. Ia menilai sulit dipercaya jika dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan Listyo seorang diri tanpa keterlibatan pihak lain.

"Pasti ada orang di atasnya. Di atasnya Listyo Sigit cuma Jokowi," kata Ryaas Rasyid di Podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu (18/11/2026).

Menurut Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh Politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Ia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan Listyo Sigit.

"Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?" ujarnya.

Ryaas juga menanggapi spekulasi yang mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam persoalan tersebut. Namun, ia meragukan Luhut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memerintah Listyo Sigit dalam perkara ini.

"Pak Luhut tidak se-powerful itu terhadap Listyo," tegasnya.

Lebih jauh, Ryaas mengingatkan agar penelusuran dugaan penyadapan tidak berhenti pada Listyo Sigit. Menurutnya, jika proses pengungkapan hanya menyasar mantan Kapolri tanpa mengusut kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, hal itu justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran.

Ia bahkan menyebut penghentian pengusutan pada Listyo Sigit sebagai bentuk pengkhianatan terhadap upaya mengungkap fakta sebenarnya.

"Berhenti pada Listyo itu adalah satu pengkhianatan terhadap usaha membuka kebenaran. Terlalu dipaksakan bahwa hanya berhenti di Listyo," katanya.

Ryaas juga menyoroti pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ini Analisis Denny Indrayana Soal Dugaan Kesepakatan Tertulis Prabowo dan Jokowi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.39 WIB

BANDA ACEH - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menduga adanya kemungkinan perjanjian Politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.Denny menilai, dugaan adanya kesepakatan antara kedua tokoh tersebut bukan sesuatu yang janggal dalam dinamika politik. Terlebih, Prabowo sebelumnya juga pernah terlibat dalam perjanjian politik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Batu Tulis yang ditandatangani Prabowo dan Megawati pada 16 Mei 2009. Kesepakatan tersebut sempat menjadi sorotan karena berkaitan dengan pencalonan presiden pada Pilpres 2014.

"Kalau itu ada informasi dari 1 2 3 4 orang bahwa ada perjanjian antara Pak Prabowo dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Beri Apresiasi ke Dasco

Oleh Van · 19 Nov, 23.16 WIB



JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Pembahasan regulasi tersebut disebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam keterangan resminya Kamis, (19/11/2026) mengatakan pengesahan dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Ia menyebut proses legislasi RUU tersebut telah melalui perjalanan panjang, termasuk pembahasan intensif di Komisi III sejak September 2025.

"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman.

Menjelang agenda tersebut, Habiburokhman bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPR turut menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Habiburokhman, Dasco ikut mengawal proses pembentukan RUU Perampasan Aset sejak awal.

Ia bahkan disebut telah meminta Komisi III mempercepat pembahasan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menjelaskan, Dasco sempat memanggil pimpinan Komisi III DPR pada Agustus 2025.

Dalam pertemuan itu, Dasco meminta agar proses pembentukan RUU Perampasan Aset segera dipercepat.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Tak hanya itu, Dasco juga disebut meminta Komisi III tetap menjalankan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) meskipun DPR sedang memasuki masa reses.

Habiburokhman mengatakan Dasco turut memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR sebelum RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna.

"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.

Agenda pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tahapan penting dalam proses legislasi yang telah berlangsung panjang.

Namun, statusnya sebagai undang-undang baru dapat dipastikan setelah rapat paripurna DPR mengambil keputusan resmi.(*)

NASIONAL

Gus Alex Akui Terima USD 75 Ribu dari Biro Haji, Sebut Pemberian Senior ke Junior

Oleh Redaksi · 18 Nov, 19.06 WIB

BANDA ACEH - - Mantan Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, mengakui pernah menerima uang sebesar USD 75.000 dari pihak biro perjalanan haji Pesona Mozaik. Uang tersebut diserahkan oleh staf operasional Pesona Mozaik bernama Nur alias Nanang.

Pengakuan itu disampaikan Alex saat menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/11).

Dalam sidang tersebut, Alex dihadirkan sebagai saksi mahkota atau terdakwa yang memberikan kesaksian untuk terdakwa lainnya.

Di hadapan majelis hakim, Alex menjelaskan bahwa uang tersebut diberikan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari seorang senior kepada junior. Ia pun membenarkan nominal uang yang diterimanya ketika dikonfirmasi oleh jaksa penuntut umum (JPU).

"Kami masih ingat mencatat Pesona Mozaik, kan begitu?" tanya jaksa.

"Nilainya kurang lebih 75.000 dollar AS?" lanjut jaksa.

"Betul," jawab Alex.

Jaksa kemudian menelusuri adanya tambahan uang sebesar USD 10.000 yang disebut-sebut dititipkan untuk Rizky Fisa Abadi, salah seorang pejabat di Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Alex, uang tersebut disimpan dalam amplop terpisah.

"Total 85.000. Nah, yang 10.000 itu di amplop berbeda warna putih bahasanya titip untuk Rizky," timpal Alex.

Alex kemudian membeberkan awal mula dirinya berkomunikasi dengan pihak Pesona Mozaik. Ia menyebut, perkenalan dengan Nanang bermula ketika pria tersebut datang ke rumahnya bersama Muis Ali Murtadho. Saat itu, keduanya membicarakan kemungkinan pengusulan jemaah haji.

Alex mengaku kemudian menghubungi Nur Arifin, mantan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor telepon Rizky Fisa Abadi. Nomor kedua pejabat tersebut lantas diberikan kepada Nanang agar komunikasi dapat dilakukan secara langsung.

"Terkait dengan Pesona Mozaik itu atas nama Nanang, yang nama aslinya Ahmad Faudzin. Saya baru tahu nama aslinya Ahmad Faudzin itu belakangan. Setahu saya namanya Nanang. Nanang yang diajak oleh Pak Muis, Mas Muis Ali Murtadho ke rumah saya, kemudian menyampaikan untuk mengusulkan jemaah yang saya tidak paham, kemudian saya menghubungi Mas Nur Arifin baru dikasih nomornya Rizky Fisa Abadi," beber Alex.

"Nah, nomor Rizky Fisa Abadi ini kemudian yang saya serahkan kepada, saya serahkan kepada Mas Nanang sekaligus nomornya Pak Nur Arifin kemudian termasuk kepada …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sri Radjasa Bongkar Dugaan Peran Listyo Sigit dalam Lengsernya Airlangga, Ini Respon Golkar!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.06 WIB



BANDA ACEH - Praktisi intelijen Sri Radjasa mengungkap dugaan keterlibatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam proses pergantian kepemimpinan Partai Golkar dari Airlangga Hartarto kepada Bahlil Lahadalia.

Ia mengklaim, Listyo Sigit diduga ikut diperankan dalam komunikasi melalui video call ketika Bahlil memanggil sejumlah Ketua DPD Golkar tingkat I satu per satu untuk meminta dukungan.

Sri Radjasa menyebut informasi tersebut diperolehnya dari sejumlah mantan Ketua DPD Golkar tingkat I. Menurut dia, komunikasi melalui video call itu diduga digunakan untuk memastikan dukungan para pimpinan daerah terhadap upaya menggantikan Airlangga dengan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya ini bicara berdasarkan fakta. Bagaimana Listyo Sigit memainkan perannya seperti separuh dewa pada saat menjatuhkan Airlangga, informasi itu saya dapat dari beberapa orang Ketua DPD Golkar tingkat I pada saat itu," ungkap Sri Radjasa dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia kemudian membeberkan kronologi yang menurutnya terjadi setelah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

Sri Radjasa mengklaim, setelah kemenangan tersebut, Bahlil memanggil para Ketua DPD Golkar satu per satu. Dalam setiap pertemuan, Bahlil disebut melakukan panggilan video dengan Listyo Sigit untuk menunjukkan siapa saja pimpinan daerah yang telah menyatakan dukungan.

"Setelah Prabowo-Gibran menang, dipanggil sama Bahlil Lahadalia. Dipanggil satu-satu, kemudian Bahlil telepon Listyo Sigit melalui video call. 'Halo, Pak Kapolri. Oh iya, yang ini oke, dukung kita untuk jatuhkan Airlangga. Terus dukung saya nanti jadi Ketua Golkar'," kata Sri Radjasa menggambarkan percakapan yang diklaimnya terjadi.

Menurut Sri, setiap Ketua DPD yang dipanggil diperlihatkan kepada Listyo Sigit melalui sambungan video call. Bahlil disebut kemudian meminta konfirmasi mengenai dukungan masing-masing pimpinan daerah.

"Jadi setiap satu orang ditunjukkan, pakai video call. Listyo Sigit di-video call sama Bahlil. Bahlil memanggil Ketua DPD satu per satu, kemudian bertanya, 'Oh ya, duduk. Apa, Pak? Oke, dukung?' Lalu telepon Listyo Sigit, 'Oke, Pak, yang ini dukung, aman'," ujarnya.

Sri Radjasa menilai, apabila informasi tersebut benar, mekanisme itu bukan sekadar dinamika perebutan kepemimpinan partai.

"Itu bukan operasi Politik, itu premanisme dalam bernegara," tegasnya.

Sri Radjasa menegaskan, informasi mengenai dugaan komunikasi antara Bahlil dan Listyo Sigit tersebut bersumber dari tiga mantan Ketua DPD Golkar tingkat I yang disebutnya kini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco Anggap Dukungan Wapres Hanya Dinamika: Mari Hormati Keputusan Presiden!

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.35 WIB

BANDA ACEH -Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai dukungan calon wakil presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ramai terhadap dirinya hanya sekadar dinamika.

“Soal tadi yang disampaikan soal dukung-mendukung dan lain-lain itu adalah dinamika,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Atas dasar itu, Dasco menegaskan bahwa persoalan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

“Marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh Bapak Presiden kita sesuai dengan undang-undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia,” jelas Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Mengaku Bisa Lebih Lincah Usai Ditinggal Kabinet Prabowo

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.18 WIB



BANDA ACEH -Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lebih lincah usai tidak ada di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Jokowi setelah pengunduran diri sejumlah petinggi PSI mulai dari Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka yang keluar dari partai tersebut.

Diketahui ketiganya saat ini merupakan anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun saat ini ketiganya sudah memutuskan keluar dari PSI.

Menurut Jokowi, dengan tidak adanya anggota PSI di Kabinet Merah Putih, maka hal itu membuat partai non parlemen tersebut akan lebih lincah.

Jokowi menjelaskan bahwa pengabdian terhadap negara tidak harus selalu berada di dalam kabinet.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat diwawancarai di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Kamis (19/11/2026) seperti dimuat Kompas Tv.

“Di luar kabinet pun tidak masalah. Malah bisa lebih lincah untuk tugas-tugas pengabdian untuk masyarakat,” kata Jokowi.

Saat ditanya posisinya apakah masih di dalam pemerintahan atau di luar, Jokowi tidak menjawab lugas.

Jokowi hanya menyebut saat ini sudah tidak ada anggota PSI di Kabinet Merah Putih.

Namun kata Jokowi, pihaknya masih mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

“Yang jelas sudah tidak ada dari PSI di pemerintahan,” bebernya.

Diketahui Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni, Wakil Ketua Umum DPP PSI Isyana Bagoes Oka, serta mantan Ketua Umum PSI Giring Ganesha memutuskan mundur dari partai tersebut.

Mundurnya para petinggi PSI ini terjadi di tengah gonjang-ganjing Politik khususnya saat adanya dugaan penyadapan yang dilakukan Geng Solo terhadap sejumlah Politisi, aktivis, hingga jurnalis.

Ketua Umum PSI yang juga anak bungsu Jokowi Kaesang Pangarep menanggapi mundurnya para petinggi PSI tersebut.

Menyebut PSI sebagai Partai Super Tbk, Kaesang berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai.

PSI pun telah menerima pengunduran diri para politisi PSI tersebut.

“DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring Ganesha,” tulis Kaesang Selasa (10/11/2026).

Kaesang memastikan pihak DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI.

NASIONAL

Jokowi Bantah Dukung Dasco Buat Jadi Wakil Presiden RI

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.13 WIB



BANDA ACEH -Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah mengerahkan relawannya untuk mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Jokowi menyebut dukungan tersebut merupakan hak Politik masing-masing relawan.

Ayah mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu mengaku tidak memberikan arahan soal siapa yang menempati kursi Wakil Presiden RI setelah ditinggal putranya.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat diwawancarai di kediamannya di Solo, Jawa Tengah Kamis (19/11/2026) seperti dimuat Kompas Tv.

"Ya, itu hak politik dari setiap relawan untuk mendukung siapa pun dan saya tidak pernah mengarahkan untuk mendukung siapa," ujar Jokowi.

Saat kembali ditanya mengenai kemungkinan adanya arahan kepada relawan, Jokowi menegaskan tidak pernah memberikan instruksi tersebut.

"Tidak ada arahan, tidak ada arahan," tegasnya.

Gibranisti Dukung Dasco

Sebelumnya dukungan untuk Dasco menjadi wakil presiden disampaikan relawan pendukung Jokowi dan Gibran sejak hari pertama Gibran menyatakan berhenti, Kamis (12/11/2026) lalu.

Saat itu, anggota Dewan Penasihat Gibranisti, Ade Darmawan, menilai Dasco menjadi sosok yang tepat menggantikan Gibran.

"Yang pertama, beliau (Gibran) menyampaikan dia tidak oposisi dan tetap mendukung pemerintahan Prabowo," kata Ade Darmawan di Istana Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).

Kami mendukung satu nama, Bang Dasco." kata Ade mantap saat melepas Gibran di Istana Wapres.

Namun Ade mengakui dukungan itu bukan arahan dari Jokowi.

“Tidak ada, kalau itu tidak ada arahan, tidak ada sama sekali. Saya rasa itu murni dari teman-teman relawan saja,” kata dia.

Ade juga menjelaskan awal mula dukungan pihaknya kepada Dasco, yakni saat Gibran menyampaikan surat berhenti sebagai wapres kepada MPR.

“Kemudian di tengah-tengah itu, terjadi pertemuan antara para pendukung relawan Prabowo-Gibran,” tuturnya.

“Yang memang di situ disampaikan kan, jelas, bahwa Mas Gibran menyampaikan bahwa kita tidak berada pada oposisi, kita tidak berada di situ. Kita tetap mendukung program-program Pak Prabowo.”

Saat ditanya mengenai kaitan antara dukungan terhadap program Prabowo dan dukungan kepada Dasco, Ade mengatakan pihaknya melihat Dasco sosok yang tepat.

Relawan Jokowi Gibran itu mengaku salut dengan Dasco yang kerap bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan termasuk demonstrasi RUU Perampasan Aset.

“Ya, tentunya kita melihat orang yang tepat, bahwa yang tepat saat ini menyelesaikan persoalan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gibran Tak Seharusnya Disalahkan, Mahfud MD: Seperti Pinjam Mobil untuk Mencuri

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.27 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan analogi pinjam mobil untuk mencuri guna menjelaskan posisi Gibran Rakabuming Raka dalam kasus surat penyetaraan ijazah. Menurutnya, pembatalan pencalonan tidak bergantung pada apakah Gibran terlibat dalam rekayasa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Pembahasan bermula dari anggapan sebagian pihak bahwa Gibran tidak seharusnya disalahkan. Argumennya, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, sedangkan aturan yang membolehkan Gibran mendaftar dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahfud membenarkan pembagian peran itu, tetapi menilai kesalahan terletak pada cara dokumen dan aturan tersebut dipakai.

“Tapi dibuatnya dan KPU-nya salah menggunakan Gibran, kan gitu kan,” kata Mahfud.

Untuk menggambarkan posisi itu, ia mengajukan perumpamaan. “Sama Anda, saya pinjam mobilnya untuk mencuri, ya kan? Lalu ketangkap. Anda enggak salah, apa? Mobilnya dibiarkan sebagai alat pencurian,” ujarnya. Ia menyebut itulah logika yang ia pakai untuk menjelaskan kasus tersebut.

Mahfud kemudian mengaitkan analogi itu dengan pertanyaan soal keterlibatan Gibran dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, ada kemungkinan Gibran tidak ikut serta, tetapi Gibran semestinya mengetahui kondisi dirinya saat itu. Mahfud menyebut Gibran tahu tidak memiliki ijazah yang dipersoalkan dan belum berusia 40 tahun, serta memiliki kepentingan dalam proses itu.

Meski begitu, ia menekankan hal tersebut tidak otomatis berarti Gibran ikut merekayasa. “Bisa jadi ketika diusut, taruhlah dia bersih. Ada konspirasi misalnya,” kata Mahfud.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kepala Bakom Beri Isyarat Pengganti Gibran: Berdoa Saja, Wapres yang Suka Pempek

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.45 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan merespons munculnya tiga nama politisi yang diisukan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ketiganya yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

Syahganda menilai ketiga sosok tersebut memiliki pemahaman terhadap ideologi Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia mengaku belum mengetahui siapa yang nantinya dipilih untuk menggantikan Gibran.

"Saya pikir tiga-tiganya itu sebenarnya sudah orang yang sangat mengerti ideologi Bapak Presiden ya," ujar Syahganda, Rabu (18/11/2026).

Dia meminta masyarakat menunggu keputusan Prabowo terkait sosok yang akan dipilih sebagai cawapres pengganti Gibran.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Muncul Dugaan Liar Jika Penyadapan Melengserkan Prabowo: Listyo atau Tito yang Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.33 WIB

BANDA ACEH - Pegiat Politik, sosial, dan ekonomi, Arif Wicaksono, menyinggung pihak yang paling memperoleh manfaat besar jika isu penyadapan ilegal berhasil melengserkan Presiden Prabowo Subianto.Menurut Arif, jika skenario tersebut terjadi, maka berdasarkan konstitusi Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden. Sementara itu, posisi wakil presiden berpotensi diisi oleh mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Siapa yang diuntungkan kalau isu penyadapan sampai melengserkan Prabowo? Jika skenarionya Prabowo lengser, secara konstitusi Gibran resmi naik jadi RI 1," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/11).

"Kursi RI 2? Bisa diisi Listyo Sigit atau Tito. Dugaan liar ini ada di pikiran publik," lanjutnya.

Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud Sebut Budi Arie Berlindung ke Solo, Eks Menkominfo yang Terseret Kasus Judol

Oleh Redaksi · 19 Nov, 20.01 WIB



BANDA ACEH – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyinggung sikap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, yang disebutnya berlindung ke Solo di tengah sorotan terhadap namanya dalam perkara dugaan perlindungan situs judi online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Mahfud menyatakan, nama Budi Arie telah disebut dalam surat dakwaan perkara judi online tersebut. Ia bahkan mengaku pernah menerima informasi mengenai detail pemeriksaan dan penyerahan dua kardus di sebuah rumah yang menurutnya mengarah pada perkara tersebut.

"Budi Arie kan sudah disebut di dalam dakwaan, di dalam dakwaan sudah disebut keterlibatan Budi Arie. Itu fakta hukum, penyebutan di dalam pengadilan itu," kata Mahfud dalam sebuah wawancara sebagaimana dinukil Monitorindonesia.com, Kamis (19/11/2026).

Mahfud kemudian mengungkapkan informasi yang pernah diterimanya melalui percakapan lanjutan (follow-up chat), mulai dari waktu pemeriksaan, pihak yang menyerahkan, lokasi penyerahan, hingga isi dua kardus tersebut.

"Bahkan dulu ada, saya pernah mendapat follow-up chat-nya tentang pemeriksaan itu tanggal berapa, ke siapa, yang menyerahkan siapa, di rumah siapa, dua kardus dan macam isinya apa. Kan di situ sudah ada waktu itu dan semua mengarah ke situ," ujarnya.

Mahfud juga secara terbuka menyebut Budi Arie berlindung ke Solo. Ia mengaitkan hal tersebut dengan langkah politik Budi Arie setelah keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra disebut tidak diterima.

"Dia kan terus berlindung ke Solo. Bergabung ke situ kan maunya masuk Gerindra, ditolak oleh Gerindra, bergabung ke Solo. Projonya mengikatkan diri ke Solo," ungkap Mahfud.

Mahfud menegaskan, pernyataannya bukan didasari kebencian terhadap Budi Arie. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan hukum dan posisi Budi Arie sebagai pejabat publik.

"Tapi ini bukan soal benci ya. Ini masalah hukum, ini harus jelas, pejabat publik," tegasnya.

Kasus dugaan perlindungan situs judi online di lingkungan Komdigi mencuat pada November 2024 setelah kepolisian mengungkap praktik sejumlah pegawai yang diduga menerima uang dari pengelola situs judi online agar situs tertentu tidak diblokir.

Dalam perkara tersebut, sejumlah pegawai diduga menjalankan tugas berbeda, mulai dari mendata situs judi online, mengatur situs yang tidak diblokir, hingga mengumpulkan dan menerima uang.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kemensetneg Diminta Bersihkan Istana dari "Orang Titipan" Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.39 WIB

BANDA ACEH -Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diminta segera melakukan sterilisasi menyeluruh di lingkar inti kepresidenan dari personel yang diduga merupakan titipan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Sugiat meminta Kemensetneg meninjau ulang personel yang bertugas di lingkungan terdekat Presiden, terutama mereka yang disebut merupakan rekomendasi pejabat kepolisian pada era Listyo Sigit.

"Saya berharap saya blak-blakan saja karena ini kepentingan Partai Gerindra dan bukan hanya kepentingan Partai Gerindra, kepentingan bangsa ini. Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" tegas Sugiat.

Menurut Juru Bicara Partai Gerindra itu, evaluasi tersebut penting untuk menutup celah penyusupan yang berpotensi mengancam keamanan Presiden maupun memengaruhi arah kebijakan pemerintah.

Sugiat pun secara khusus meminta pemeriksaan dilakukan terhadap personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga jajaran birokrasi di lingkungan Kemensetneg.

"Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri. Kan banyak ini ketika apa ya penyusunan jajaran birokrasi kementerian ada dari sini ada dari sini. Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana apa ya kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat," katanya.

Sugiat juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dinilainya menunjukkan lemahnya sistem pengamanan Istana. Ia meminta Kemensetneg memperkuat perangkat teknologi untuk mendeteksi ancaman penyadapan, baik melalui alat yang dipasang secara langsung maupun teknologi jarak jauh.

"Saya pikir ini yang paling penting dari tugas Kementerian Sekretariat Negara ke depan. Memastikan ini kan sebetulnya kecolongan sekali. Seorang Presiden bisa disadap berarti kan istananya tidak steril," tegasnya.

Sugiat mengaku belum mengetahui secara terperinci metode penyadapan yang digunakan. Namun, menurutnya, ketidakpastian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi Istana untuk tidak memiliki sistem pendeteksi ancaman yang memadai.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril: Ada Tokoh yang Pakai Hasil Sadapan Listyo Sigit untuk Gulingkan Presiden

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.05 WIB



BANDA ACEH - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkap adanya petunjuk keterlibatan pihak lain dalam dugaan kasus makar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan hasil penyadapan yang dilakukan oleh pihak internal Polri.Yusril mengatakan, penyidikan yang awalnya berfokus pada kalangan internal Polri kini membuka kemungkinan adanya keterlibatan pihak di luar institusi kepolisian.

"Ya, sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, namanya pemeriksaan ini, memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri, tapi tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri," kata Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Yusril, penyidik juga berpeluang memeriksa pejabat maupun birokrat pemerintahan lainnya apabila ditemukan keterkaitan dengan tujuan penyadapan tersebut.

"Dan karena itu memang pemeriksa akan terus dilakukan, bahkan mungkin juga dilakukan kepada pejabat ataupun birokrasi pemerintahan yang lain yang terkait dengan tujuan dari penyadapan itu sendiri. Dan itu harus dilakukan," ujarnya.

Yusril menjelaskan, penyidik masih mendalami pihak yang memberikan perintah maupun pihak yang memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.

"Ya, masih dalam tahap pendalaman," kata Yusril ketika ditanya apakah penyidik telah menemukan pihak yang memerintahkan atau menggunakan hasil penyadapan.

Ia kemudian menyinggung keterangan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa hari sebelumnya. Saat itu, menurut Yusril, Kapolri menyatakan bahwa pengguna akhir atau end-user hasil penyadapan adalah mantan Kapolri Listyo Sigit.

"Sampai beberapa hari yang lalu ketika dia ada kantor kerja dengan DPR, Pak Kapolri menyatakan bahwa sampai saat ini end-usernya adalah mantan Kapolri, Pal Sigit," ungkapnya.

Namun, Yusril menyebut proses penyidikan terus berkembang. Dari pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti terbaru, penyidik menemukan petunjuk yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar dengan tujuan menghalangi presiden menjalankan tugas dan kewajibannya.

"Tapi sampai saat itu, sesudah itu kan ada hasil-hasil pengembangan, hasil dari tahap penyidikan dan pemeriksaan terhadap proses yang baru dan pengumpulan alat bukti, memang ditemukan petunjuk ke arah betul-betul ada satu perbuatan makar dengan satu tujuan, tujuan tertentu, paling tidak tujuannya itu membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya," jelas Yusril.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dana Bencana BNPB Diduga Jadi Bancakan Proyek, KPK Bongkar 3 Modus!

Oleh Van · 18 Nov, 16.48 WIB

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan.

Modus tersebut mulai dari peminjaman bendera perusahaan, pemberian fee kepada oknum pejabat BNPB, hingga dugaan penggelembungan harga atau mark-up pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan resminya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan sejumlah perusahaan diduga menggunakan nama perusahaan lain untuk memperoleh proyek. Namun, pekerjaan tersebut justru dikerjakan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan.

"Ada para pihak ini kemudian yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian atas proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS (Bima Setiawan)," ujar Budi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Islah Bahrawi: Tujuan Penyadapan untuk Menumbangkan Prabowo agar Gibran Jadi Presiden

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.56 WIB



BANDA ACEH - Pengamat intelijen dan terorisme Islah Bahrawi melontarkan dugaan serius terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, penyadapan tersebut patut dilihat bukan hanya sebagai persoalan keamanan negara, melainkan juga kemungkinan bagian dari skenario Politik untuk menggoyang pemerintahan Prabowo dan membuka jalan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden.Islah menduga, ada desain politik yang telah disiapkan sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, skenario tersebut berkaitan dengan pernyataan seorang tokoh yang disebutnya berinisial LSP kepada sejumlah perwira tinggi kepolisian.

" Ternyata ini tujuan penyadapan Presiden Prabowo. Tujuan dari penyadapan ini ingin menumbangkan Prabowo supaya wakilnya menjadi presiden. Silakan simpulkan sendiri siapa yang bermain," kata Islah dalam podcast yang beredar di media sosial, Kamis (19/11/2026).

Ia kemudian mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan Prabowo hanya bertahan selama dua tahun sebenarnya sudah beredar sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Islah, LSP pernah menyampaikan kepada beberapa perwira tinggi di lingkungan Polri bahwa masa pemerintahan Prabowo tidak akan berlangsung lama. Batas waktunya, menurut pernyataan yang dikutip Islah, hanya sekitar dua tahun.

"Bahkan LSP pernah bilang juga kepada beberapa perwira tinggi bahwa orang-orang yang ada di sekitaran Prabowo ini nanti orang-orang kita," ungkapnya.

Pernyataan tersebut, menurut Islah, menjadi penting jika dikaitkan dengan perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Ia menduga terdapat upaya membangun pengaruh di sekitar lingkaran kekuasaan Presiden sejak awal pemerintahan. Salah satu hal yang disorotnya adalah persoalan pengajuan personel kepolisian untuk menjadi ajudan Presiden.

Islah menyebut ada seorang perwira tinggi Polri yang pernah diajukan sebagai ajudan Presiden, tetapi tidak mendapatkan persetujuan Prabowo. Perwira tersebut, menurut Islah, belakangan disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara yang sedang menjadi sorotan.

"Presiden hanya ingin ajudan saya ini orang-orang yang saya pilih. Dari satu polisi menjadi ajudan itu akhirnya memang tidak ada yang dipakai," ujarnya.

Bagi Islah, rangkaian peristiwa tersebut memunculkan dugaan adanya desain untuk menempatkan orang-orang tertentu di sekitar Presiden. Ia menghubungkan dugaan itu dengan pernyataan mengenai masa jabatan Prabowo yang disebut hanya akan berlangsung dua tahun.

"Artinya ada semacam desain dari awal yang sudah dirancang oleh LSP dan mungkin juga gengnya, bahwa memang Prabowo ini hanya dua tahun," katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Tifa Tolak Kesaksian Dua Pegawai KPU di Sidang Ijazah Jokowi, Ungkit Sidik Jari dan Debat dengan JPU

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.30 WIB



BANDA ACEH — Suasana persidangan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali diwarnai ketegangan.

Terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa secara tegas menolak keterangan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dua saksi tersebut adalah pejabat Sekretariat Jenderal KPU RI Andi Bagus Makkawaru dan mantan anggota KPU DKI Jakarta Binsar S.T. Siagian.

Keduanya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Namun, Tifa justru mempertanyakan kapasitas kedua saksi tersebut. Ia menilai keterangan yang disampaikan tidak didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman langsung terkait persoalan yang dipermasalahkan.

"Karena kedua saksi ini bukan saksi fakta dan apa yang disampaikan tadi tidak tahu dan tidak betul-betul menyaksikan," ujar Tifa dalam persidangan.

"Sehingga saya menolak keterangan kedua saksi," tegasnya.

Keberatan tersebut disampaikan Tifa secara langsung di hadapan majelis hakim.

Ia mempertanyakan mengapa keterangan kedua saksi dapat dijadikan bagian dari proses pembuktian apabila mereka tidak menyaksikan sendiri persoalan yang menjadi pokok perdebatan.

Tifa Pertanyakan Fotokopi Ijazah, Legalisasi hingga Sidik Jari Jokowi

Tidak hanya mempersoalkan kapasitas saksi, Tifa juga menyoroti sejumlah aspek terkait dokumen ijazah Jokowi yang menjadi perhatian dalam persidangan.

Beberapa hal yang dipertanyakannya meliputi bukti fotokopi ijazah, proses legalisasi dokumen, hingga persoalan sidik jari Jokowi.

Pertanyaan tersebut mengarah pada bagaimana dokumen persyaratan pencalonan presiden diterima dan diverifikasi oleh KPU, termasuk sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu tersebut melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan.

Dalam keterangannya, Andi Bagus Makkawaru sebelumnya menjelaskan bahwa KPU melakukan verifikasi administratif terhadap berkas persyaratan pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Ia juga menerangkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis KPU, salinan ijazah yang telah dilegalisasi tetap dapat diterima meskipun tidak mencantumkan tanggal legalisasi.

Keterangan tersebut menjadi salah satu materi yang dipersoalkan oleh pihak terdakwa dalam pemeriksaan saksi.

Tifa Sempat Berdebat dengan Jaksa Penuntut Umum

Dinamika persidangan semakin terlihat ketika Tifa terlibat adu argumen dengan Jaksa Penuntut Umum di depan meja majelis hakim.

Tifa menyampaikan keberatan terhadap keterangan saksi dan proses pemeriksaan yang berlangsung.

Perdebatan tersebut terjadi di hadapan Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Andi Widjajanto Ungkap: Hasil Sadapan Listyo Dicetak Lalu Dibawa Kurir ke Dua Kota

Oleh Redaksi · 18 Nov, 20.09 WIB

BANDA ACEH – Dalam perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pengamat pertahanan sekaligus Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) Pusat PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, mengungkapkan modus distribusi hasil sadapan yang dilakukan secara fisik.Menurut Andi, para pelaku sengaja menghindari jalur digital agar jejak elektronik putus. Data hasil sadapan yang diambil dari server Lawful Interception Management System (LIMS) diunduh secara luring menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak menjadi dokumen fisik (print out). Dokumen tersebut lalu dikirim via kurir dari Jakarta ke kota lain yang disebut sebagai kota X dan Y.

"Akhirnya hasil sadapnya dicetak, pakai kurir dari Jakarta ke kota X dan Y. Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar," ujar Andi Widjajanto pada Selasa (17/11/2026).

Andi menilai cara ini justru memudahkan penelusuran karena melibatkan aktivitas fisik pengiriman. Ia meyakini Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah mengantongi identitas dalang utama serta jejaring di atas Listyo Sigit melalui alur distribusi dokumen tersebut.

Kasus ini berawal dari temuan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memaparkan bahwa Listyo Sigit diduga berperan sebagai pemberi perintah, penentu target, sekaligus penerima akhir (end user) hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain. Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa prosedur yang sah. Hasil sadapan dilaporkan secara harian maupun dalam bentuk analisis kepada Listyo. Pada Oktober 2026, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan data di sistem LIMS dan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi operasi.

Andi Widjajanto sebelumnya juga menyoroti kejanggalan perangkat penyadapan yang digunakan serta kemungkinan adanya infrastruktur yang dibawa dari jabatan sebelumnya. Ia menyebut praktik ini sebagai bentuk deep state yang memanfaatkan kewenangan dan sistem kepolisian secara ilegal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ketum MUI Nilai Dasco Cocok Jadi Wapres Pendamping Prabowo

Oleh Van · 18 Nov, 21.32 WIB

JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya sebagai wakil presiden RI. Anwar Isakandar menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad cocok untuk posisi tersebut.

"Saya Muhammad Anwar Iskandar, ketika ditanya siapa yang paling cocok untuk mengisi wakil presiden yang kosong, saya pikir butuh orang yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar Iskandar mengawali pendapatnya, Rabu (18/11/2026).

Anwar mengatakan Wapres RI nantinya harus mampu melaksanakan program-program utama untuk membangun negara. Ia memandang dibutuhkan figur yang mampu memberikan masukan kepada presiden.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Total 59 Orang Diperiksa di Kasus Makar Prabowo, Termasuk Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.19 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri telah memeriksa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengumpulan keterangan terhadap 59 saksi yang telah diperiksa penyidik.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, empat dari 59 saksi tersebut merupakan perwira tinggi Polri yang telah menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, keempat tersangka penyadapan itu juga telah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Penyidik turut memeriksa sejumlah pihak lain yang dinilai memiliki informasi terkait perkara tersebut.

Empat perwira tinggi itu adalah Listyo Sigit, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam penyidikan kasus dugaan makar, polisi juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk posko yang diduga menjadi tempat perencanaan. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti lain.

Susatyo mengatakan, penyidik masih mendalami unsur pidana makar karena pembuktiannya tidak sederhana. Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan pelaksanaan perbuatan.

"Kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan persiapan. Kedua dari sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," jelasnya.

Bareskrim juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam gelar perkara kasus dugaan makar yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis ini.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Keempatnya dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Slamet tidak ditahan.

Polisi juga menduga penyadapan tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh Politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat disebut turut menjadi korban.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yaqut Tolak Jadi Saksi Sidang Gus Alex dkk dalam Kasus Korupsi Kuota Haji: Saya Merasa Tidak Berkaitan

Oleh Van · 18 Nov, 17.47 WIB

JAKARTA — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menolak menjadi saksi bagi tiga terdakwa lainnya dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Penolakan tersebut disampaikan langsung kepada Hakim Ketua dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 18 November 2026.

Ketiga terdakwa yang dimaksud adalah mantan staf khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham; serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani awalnya menanyakan kesediaan Yaqut untuk memberikan kesaksian dalam perkara ketiga terdakwa tersebut.

Namun, Yaqut menyatakan tidak bersedia dengan alasan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat mereka.

“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut dalam persidangan tersebut.

Klaim Menjaga Kondisi Kesehatan

Di sisi lain, kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi kesehatan kliennya.

Menurut Mellisa, Yaqut perlu menjaga kondisi agar tetap fokus dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa.

“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.

Tiga Terdakwa Lain Bersedia Menjadi Saksi

Berbeda dengan Yaqut, ketiga terdakwa lainnya menyatakan bersedia menjadi saksi untuk perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

Adapun kasus yang menjerat keempat terdakwa berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024.

Bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000 dan menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

Persoalan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD Kangen Eks Kapolri, Ingin Lihat Wajah Listyo Sigit saat Diborgol di Sidang Etik

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.38 WIB



BANDA ACEH -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan sindiran tajam kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud mengaku masyarakat sudah merindukan kemunculan Listyo di hadapan publik.

Bahkan, Mahfud secara terang-terangan menyampaikan keinginannya melihat mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu tampil ketika menjalani sidang etik, termasuk saat digiring dalam kondisi tangan diborgol.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (17/11/2026).

Dengan nada menyindir, Mahfud mengusulkan agar Mabes Polri tidak menutup-nutupi proses pemeriksaan etik yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Sebenarnya sih, kalau boleh usul nih saya kepada Mabes Polri, ini rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listyo ini," kata Mahfud.

Ia bahkan ingin wajah Listyo diperlihatkan kepada masyarakat ketika menjalani proses pemeriksaan di komisi etik.

"Jadi kalau saat diadili nanti di komisi etik besok atau besok lusa itu, saya usul ditampilkanlah wajahnya. Kita sudah kangen untuk bilang, hai," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Mahfud melontarkan sindiran yang lebih tajam.

"Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik itu," tutur Mahfud.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai usulan dan sindiran mengenai keterbukaan serta kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum. Bukan berarti Listyo telah ditahan atau dipastikan akan diborgol dalam proses etik.

Mahfud Usul Listyo Diberhentikan Lebih Dahulu

Sebelum menyampaikan sindiran tersebut, Mahfud lebih dahulu berbicara mengenai perlunya tindakan etik terhadap Listyo.

Menurutnya, pemberhentian dari institusi kepolisian sebaiknya dilakukan lebih dahulu sebelum proses pidana berjalan.

Mahfud menilai, selama status keanggotaan dan jabatannya masih melekat, seseorang masih berhak mendapatkan fasilitas yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai jenderal.

"Memang kita usul semua itu dipecat dulu, pidananya nanti. Sekarang dia kan masih jenderal, masih punya hak rumah, punya hak dikawal," kata Mahfud.

Dalam perbincangan tersebut, Rizal Mustary juga menyoroti persoalan kesetaraan perlakuan terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum.

Ia membandingkan perlakuan terhadap pejabat tinggi kepolisian dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo yang pernah diperlihatkan kepada publik dalam kondisi diborgol ketika digiring menuju ruang pemeriksaan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Geng Solo Masih Kuasai Kejagung: Silfester Matutina tak Kunjung Dieksekusi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.16 WIB

BANDA ACEH - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menyebut, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Silfester Matutina sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunda pelaksanaan eksekusi, penjarakan segera bos relawan Jokowi itu."Kasus Silfester itu sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini kewenangan Kejaksaan (Kejaksaan Agung). Saya tidak merasa aneh apabila pimpinan Kejaksaan diduga masih berafiliasi dengan kekuatan lama yang 'membekingi' Silfester. Karena itu seakan yang bersangkutan sulit dieksekusi," jelas Hudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, perbuatan para jaksa yang menunda-nunda eksekusi terhadap Silfester ini, dapat dituntut secara hukum. Karena menghalangi proses hukum.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Korupsi Suap Imigrasi, KPK Didesak Tersangkakan Menteri "RAMA"

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.14 WIB



BANDA ACEH - — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didesak mengusut aliran uang setoran mingguan sebesar Rp40 juta kepada sosok berkode "RAMA".

Sosok misterius itu, muncul dalam surat dakwaan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim.

Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (PETISI AHLI), Dr. (c) Pitra Romadoni Nasution, meminta KPK tidak berhenti pada pihak-pihak yang diduga mengumpulkan dan menyalurkan uang.

Sosok yang disebut sebagai penerima aliran dana juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat di level pimpinan kementerian.

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap pihak yang diduga menerima uang dimungkinkan sepanjang penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.

"Apabila dalam proses penyidikan dan persidangan ditemukan minimal dua alat bukti yang sah dan cukup yang menunjukkan seseorang benar-benar menerima, mengetahui, atau turut serta dalam penerimaan uang hasil tindak pidana korupsi, maka secara hukum orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," kata Pitra kepada Monitorindonesia.com Kamis (19/11/2026).

Namun, Pitra mengingatkan penyidik harus membedakan antara nama yang sekadar disebut dalam dakwaan, pihak yang dialokasikan uang, dan orang yang benar-benar menerima serta menikmati uang tersebut.

"Ketiganya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda," ujarnya.

Ia meminta, KPK harus mengusut tuntas dugaan perintah pemberian uang kepada sosok berkode RAMA, termasuk memastikan apakah setoran Rp40 juta setiap pekan benar-benar diserahkan dan siapa pihak yang menerima.

Penyidik juga diminta menelusuri bukti transaksi, komunikasi, keterangan saksi, serta pengetahuan penerima mengenai asal-usul uang yang diduga berasal dari pungutan tidak resmi.

"Jangan sampai seseorang yang diduga menerima aliran dana justru tidak tersentuh hukum hanya karena memiliki jabatan tinggi," tandasnya.

Meski demikian, Pitra menekankan penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada tekanan opini publik, melainkan harus bertumpu pada kecukupan alat bukti.

Desakan tersebut mencuat setelah JPU KPK mengungkap mekanisme pengumpulan uang tidak resmi dari layanan pengurusan dokumen keimigrasian dalam surat dakwaan perkara yang menyeret mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Dalam dakwaan, jaksa menguraikan bahwa sekitar Oktober-November 2024, setelah Silmy dilantik sebagai Wamen Imipas, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra memanggil Tessar Bayu Setyaji dan Juniadi Sri Priambudi ke ruangannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD, Persoalkan Transparansi RUU Perampasan Aset

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.24 WIB



BANDA ACEH - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Peneliti ICW Ibrahim mengatakan, pengaduan tersebut dilayangkan lantaran koalisi menilai DPR tidak transparan dalam menyampaikan dokumen rancangan undang-undang kepada masyarakat. Ia menilai, proses pengesahan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya persoalan dalam tata cara pembentukan undang-undang di parlemen.

"Hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, pengaduan kepada MKD merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada DPR. Somasi tersebut dinilai telah jatuh tempo pada 16 November 2026, sehingga pihaknya memutuskan meneruskan persoalan itu melalui mekanisme etik di DPR.

"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," tegasnya.

Menurut Ibrahim, kewajiban menyebarluaskan rancangan undang-undang telah diatur dalam ketentuan hukum. Namun, hingga RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, pihaknya mengaku belum menemukan dokumen tersebut dipublikasikan melalui situs resmi DPR.

Ibrahim memastikan, pengaduan yang disampaikan koalisi telah diterima oleh sekretariat MKD dan memperoleh nomor laporan. Pihaknya berharap lembaga etik DPR tersebut segera memproses aduan sekaligus menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Lebih lanjut, dia mempertanyakan bahwa DPR, khususnya Komisi III, telah melibatkan masyarakat secara terbuka dalam pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, banyaknya kelompok masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak otomatis menunjukkan partisipasi publik yang bermakna.

"Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik," ungkapnya.

Ibrahim pun menilai, pembahasan yang dilakukan tanpa keterbukaan draf undang-undang tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memahami substansi aturan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Skandal Suap HGB Summarecon, Fahd A Rafiq Ngaku Beri Rp70 Miliar untuk Muktamar NU

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.31 WIB

BANDA ACEH - Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz Arafiq alias Fahd Arafiq, mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Politikus Partai Golkar itu bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka."KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan, dikutip Rabu (18/11/2026).

Fahd mengeklaim uang tersebut diberikan untuk kepentingan Muktamar NU, bukan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang kini menjeratnya.

Sebelumnya, Fahd juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen berinisial AS, yang turut menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.

Menurut Fahd, permintaan uang itu disampaikan beberapa kali pada Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai talangan untuk Muktamar NU.

"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," ujar Fahd seusai pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).

KPK Panggil Bos Anak Usaha Intiland dalam Pengembangan Kasus Korupsi Bea Cukai

Meski menyebut adanya nama petinggi yang dibawa dalam permintaan uang tersebut, Fahd tidak mengungkap identitas pihak yang dimaksud.

Klaim Fahd mengenai pemberian uang untuk Muktamar NU merupakan keterangannya sebagai tersangka. Belum ada penjelasan dari KPK dalam bahan keterangan tersebut yang memastikan aliran maupun penggunaan dana Rp70 miliar sebagaimana diklaim Fahd.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerindra Minta Istana Steril dari Lingkaran 'Orang Listyo'

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.10 WIB

BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso meminta Istana Kepresidenan agar steril dari orang-orang dekat mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo."Memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan!" ujar Sugiat saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro di ruang rapat Komisi XIII DPR, Rabu (18/11/2026).

Dirinya menilai, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menjadi target penyadapan oleh Jenderal Listyo, sehingga sudah waktunya Istana melakukan bersih-bersih dari lingkaran mantan Kapolri tersebut.

"Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden …

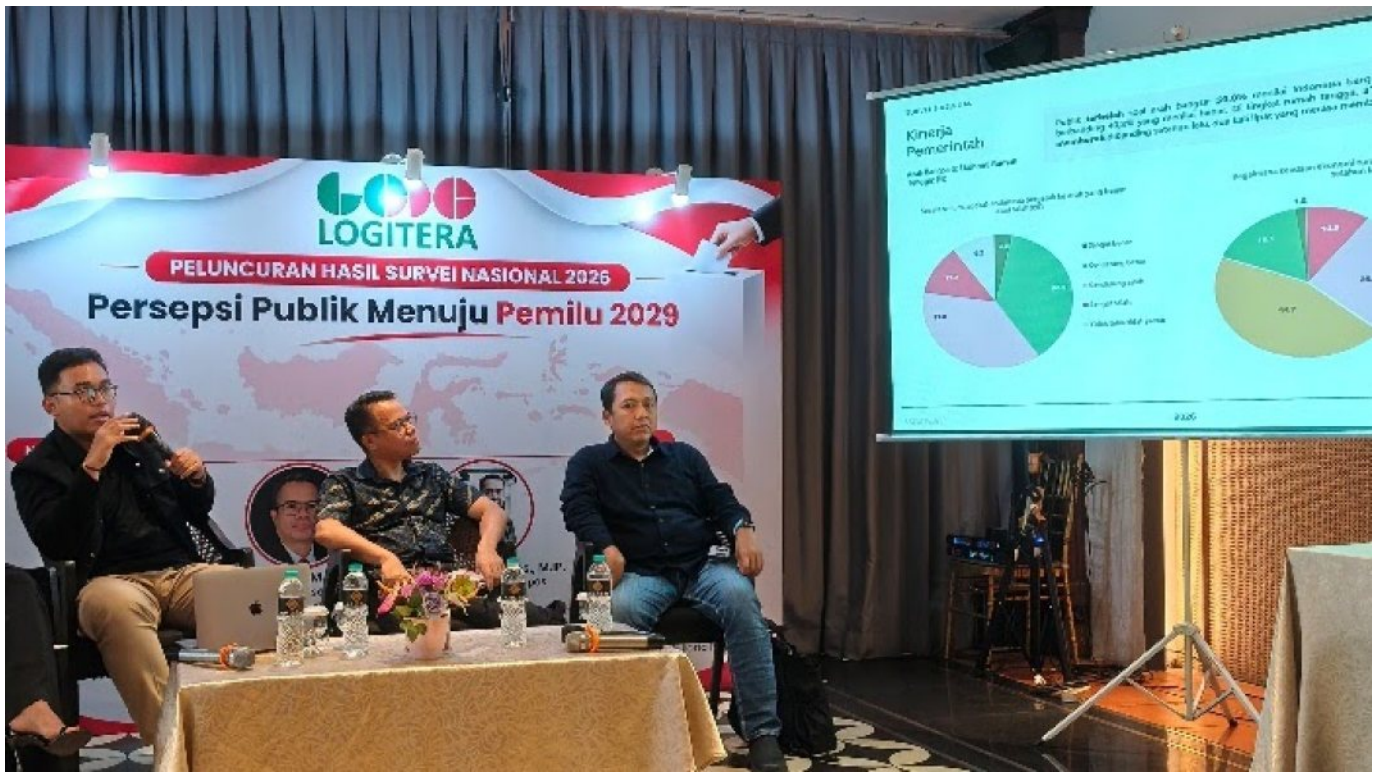
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Budiman Sudjatmiko hingga Sherly Tjoanda Masuk Simulasi Cawapres

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.03 WIB



BANDA ACEH -Mayoritas masyarakat menginginkan proses penjaringan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2029 dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan kader partai koalisi hingga tokoh di luar partai Politik. Mekanisme ini dinilai dapat membuka peluang bagi figur alternatif, termasuk Budiman Sudjatmiko, melalui konvensi masyarakat sipil.

Temuan survei Logitera Research & Data Consulting menunjukkan, sebanyak 54,9 persen responden memilih mekanisme penjaringan terbuka. Hasil ini mencerminkan keinginan masyarakat agar penentuan cawapres tidak hanya menjadi urusan elite partai politik.

Dalam simulasi terbuka cawapres, Budiman Sudjatmiko memperoleh 6,1 persen. Angka tersebut berada di bawah Dedi Mulyadi sebesar 12,4 persen, Gibran Rakabuming Raka 10,8 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono 7,5 persen. Sementara Sherly Tjoanda dan Mahfud MD masing-masing memperoleh 4 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menilai penjaringan terbuka dapat memberi ruang bagi tokoh di luar partai politik untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Salah satu alternatifnya adalah konvensi yang digelar kelompok masyarakat sipil untuk menghimpun aspirasi publik mengenai figur pemimpin nasional.

"Dengan banyaknya kepemimpinan, maka konvensi bisa membuka ruang memori elit dan publik untuk masuk panggung, seperti Budiman, Sherly Tjoanda, dan lain-lain," kata Yohan di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Menurut Yohan, konvensi masyarakat sipil dapat menjadi tradisi baru dalam penjaringan pemimpin di luar mekanisme partai politik.

"Misalkan gabungan masyarakat sipil membuat konvensi menampung aspirasi orang yang bisa menjadi alternatif di dunia politik, membangun tradisi baru di luar partai," kata Yohan.

Dukungan terhadap penjaringan terbuka sejalan dengan penolakan terhadap pembagian posisi cawapres berdasarkan jatah partai koalisi. Sebanyak 52,1 persen responden menilai mekanisme tersebut tidak wajar dan posisi cawapres sebaiknya ditentukan berdasarkan kemampuan.

Adapun 32,5 persen responden menganggap pembagian jabatan tersebut wajar sebagai bagian dari kerja sama politik, sedangkan 15,3 persen lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Dalam menentukan figur cawapres, integritas juga menjadi pertimbangan utama. Sebanyak 51,9 persen responden menginginkan calon yang memiliki rekam jejak bersih dari korupsi, sementara 36,2 persen lebih mengutamakan pengalaman di pemerintahan.

Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, menilai kemunculan nama Budiman Sudjatmiko dan Sherly Tjoanda dalam simulasi politik berkaitan dengan kecenderungan pemilih yang semakin mempertimbangkan sosok kandidat secara personal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Crazy Rich Muhammad Fitno Dipanggil KPK di Kasus LPEI

Oleh Redaksi · 19 Nov, 13.05 WIB



BANDA ACEH -Pengusaha asal Kepulauan Bangka, Muhammad Fitno, dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, hari ini, Kamis, 19 November 2026, tim penyidik memanggil Muhammad Fitno selaku swasta sebagai saksi.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Yang bersangkutan belum datang," kata Budi kepada wartawan, Kamis siang, 19 November 2026.

Selain itu kata Budi, tim penyidik juga memanggil seorang saksi lainnya, yakni Adhary Mahaputra selaku swasta.

Sejak Maret 2024, KPK telah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur, beberapa perusahaan sudah naik penyidian. Adapun total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih Rp11,7 triliun.

Dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari LPEI ke Bara Jaya Utama (BJU) Grup, KPK telah menahan 1 tersangka selaku pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), Hendarto (HD) pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Dalam perkaranya, kedua perusahaan yang dimaksud mendapatkan pembiayaan atau fasilitas kredit dari LPEI berupa Kredit Investasi Ekspor (KIE) dan Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE).

Pada periode Oktober 2014 hingga Oktober 2015, PT SMJL mendapatkan fasilitas KIE sebanyak dua kali dengan total mencapai Rp950 miliar untuk refinancing kebun kelapa sawit dengan luas lahan inti sekitar 13.075 hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 9 tahun sejak 25 November 2014 sampai dengan 25 Oktober 2023.

Sementara, PT SMJL mendapat KMKE senilai Rp115 miliar, yang diperuntukan refinancing kebun kelapa sawit milik PT SMJL. Kemudian, untuk PT MAS, pada April 2015 mendapat fasilitas dari LPEI sebesar 50 juta dolar AS atau sekitar Rp670 miliar berdasarkan kurs dolar pada 2015.

Sementara peruntukan kebutuhan operasional PT SMJL hanya sebesar Rp17 miliar atau sekitar 3,01 persen dari total pinjaman dan kebutuhan operasional PT MAS senilai 8,2 juta dolar AS atau sekitar Rp110 miliar berdasarkan kurs dolar pada 2015, atau sekitar 16,4 persen dari total pinjaman.

Sementara terkait keterlibatan PT KPN adalah, pihak LPEI memasukkan PT KPN yang belum beroperasi dan baru pada tahapan proses akuisisi oleh …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar

Oleh Redaksi · 18 Nov, 16.44 WIB

BANDA ACEH – Bareskrim Polri menggeledah rumah milik Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa malam (17/11). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang menyeret jenderal bintang dua itu.Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Condro Kirono membenarkan penggeledahan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (18/11).

Dia menyebut, rumah tersebut diduga digunakan Eko sebagai posko untuk menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso) untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar," kata Susatyo.

Meski demikian, Susatyo belum membeberkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan penyidik. Informasi lebih lengkap, kata dia, akan disampaikan melalui konferensi pers resmi Bareskrim Polri.

"Akan disampaikan saat prescon lengkap," ujarnya.

Penggeledahan tersebut berlangsung bersamaan dengan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Eko yang berstatus sebagai terduga pelanggar.

Dalam sidang tersebut, Eko dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan itu berkaitan dengan pelanggaran etik dalam kasus dugaan penyadapan atau akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, putusan sidang KKEP terdiri atas dua jenis sanksi.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan tindakan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari institusi Polri.

"Sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo di Gedung Presisi, Divisi Propam Polri, Jakarta.

Sidang Etik Berlangsung Sembilan Jam

Sidang etik terhadap Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo.

Setelah majelis membacakan putusan, Eko menyatakan mengajukan banding.

"Atas putusan itu, EHS (Eko) mengajukan banding," ujar Trunoyudo.

Sesuai ketentuan yang berlaku, majelis KKEP telah menerima pengajuan banding tersebut. Polri selanjutnya akan membentuk komisi banding untuk memeriksa kembali perkara Eko.

Trunoyudo memastikan hasil sidang banding nantinya juga akan disampaikan kepada publik secara terbuka.

Sebelumnya, Polri telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam perkara …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Roy Suryo Pamer Kaus Baru, Sindir Rismon Tak Hadir Sidang Kasus Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 18 Nov, 18.54 WIB

BANDA ACEH - Terdakwa Roy Suryo menyindir Rismon Sianipar yang tidak hadir dalam sidang kasus dugaan fitnah terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (18/11/2026).

Rismon sebelumnya dipanggil jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjadi saksi dalam persidangan tersebut.

Sindiran itu disampaikan Roy saat sesi jumpa pers seusai persidangan. Dia membuka kancing kemejanya untuk memperlihatkan kaus putih bergambar wajah Rismon dengan tulisan 'Rismon End Game'.

Roy juga meminta Rismon memenuhi panggilan jaksa dan hadir di persidangan.

"Wah, ini Rismon End Game, ya. Gitu. Jadi hari ini end game dia, ya. Gitu, tapi bukan end game lah, nanti silakan datang," kata Roy sambil menunjuk kaos yang dikenakannya, Rabu (18/11/2026).

Roy kemudian mengungkit pernyataan Rismon yang sebelumnya disebut antusias ingin memberikan keterangan di ruang sidang. Namun, saat dipanggil sebagai saksi, Rismon justru tidak hadir.

"Nah, Rismon Hasiholan Sianipar. Karena Rismon itu sudah menantang-nantang untuk bisa hadir," kata Roy.

Meski Rismon tidak hadir, persidangan tetap berlangsung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Akhirnya, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU, Koruptor Dihukum Mati

Oleh Redaksi · 19 Nov, 12.20 WIB



BANDA ACEH --- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pengesahan beleid ini menandai tuntasnya proses pembahasan panjang selama 18 tahun di parlemen.

Ia menegaskan, keputusan pengambilan tingkat II tersebut murni didasarkan pada kesiapan substansi hukum yang telah dibahas secara matang tanpa adanya tekanan pihak manapun.

"Hari ini kita mensahkan Undang-Undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Puan memaparkan, proses harmonisasi juga dilakukan secara ketat guna memastikan beleid baru ini selaras serta tidak berbenturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, Kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi Untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil pemilihan Untuk menyerap aspirasi akar rumput juga sudah dilakukan penelitian, penelahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP," jelasnya.

Usai memaparkan rangkaian proses legislasi di hadapan seluruh fraksi yang hadir, Puan langsung meminta persetujuan forum rapat paripurna sebelum mengetuk palu pengesahan. Seluruh peserta sidang yang hadir menyatakan persetujuan bulat terhadap rancangan undang-undang tersebut.

"Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju," imbuhnya.

Pidana Mati Koruptor

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan, undang-undang ini berdiri di atas empat pilar utama.

Pilar pertama mengatur asas penghormatan hak asasi manusia serta perluasan cakupan kejahatan finansial maupun teknologi informasi dengan tetap mempertahankan hukuman maksimal bagi pelaku korupsi.

"Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan, ada 4 pilar. Pilar pertama azas dan ruang lingkup, azasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas, lalu ada perluasan kekejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kepuasan terhadap Prabowo Melonjak, Penegakan Hukum Mampu Tangkap Jenderal bukan Maling Ayam!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 12.26 WIB



BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyoroti meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto setelah penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan.Menurut Adi, peningkatan kepuasan publik tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Terlebih, aparat kini dinilai mampu menindak seorang jenderal, bukan hanya masyarakat kecil.

"Tentu Bakom punya data dan argumentasi soal itu semua. Cuma satu hal yang menarik bahwa tingkat kepercayaan publik meningkat karena ada penangkapan oknum aparat kasus penyadapan. Pernyataan ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, publik puas dan mengapresiasi kinerja di bidang hukum, jenderal pun ditangkap, selama ini kan yang ditangkap cuma maling ayam," tutur Adi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Namun, Adi melihat kemungkinan tafsir lain di balik pernyataan Badan Komunikasi (Bakom) RI mengenai meningkatnya kepuasan publik terhadap Prabowo.

Menurutnya, Bakom bisa saja ingin menyampaikan bahwa serangan negatif terhadap pemerintahan Prabowo selama ini memiliki kaitan dengan oknum aparat yang kini ditangkap dalam kasus penyadapan.

"Kedua, mungkin saja Bakom ingin mengatakan bahwa 'serangan negatif' ke pemerintah selama ini ada kaitannya dengan oknum-oknum yang ditangkap tersebut," ujar Adi.

Ia menduga, pihak-pihak tersebut mungkin memiliki andil dalam membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah. Meski demikian, Adi menegaskan pandangan tersebut sebatas analisis, bukan kesimpulan berdasarkan bukti keterlibatan para tersangka.

"Karena punya andil mendowngrade pemerintah. Tapi apapun ini cuma analisa publik saja. Persisnya hanya Bakom yang tahu," ucapnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum harus dibangun melalui penyelesaian seluruh perkara secara adil, tanpa membedakan besar atau kecilnya kasus.

"Kasus besar, sedang maupun kecil yang menyangkut masyarakat kecil harus diselesaikan secara adil oleh aparat penegak hukum," jelas Andreas.

Agenda Prabowo di KTT APEC 2026 Shenzhen Hari Ini, Bertemu Xi Jinping hingga Bahas CEPA

Sebelumnya, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mengalami peningkatan dari 43 persen menjadi 62–63 persen berdasarkan pemantauan big data lembaganya.

Temuan tersebut disampaikan Syahganda dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Fantastis! Polda Sumut Sita 30,34 Ton Narkotika Senilai Rp3,36 Triliun

Oleh Van · 18 Nov, 16.42 WIB

MEDAN – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengungkap 981 kasus narkotika dalam kurun waktu 46 hari.

Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 1.311 tersangka dan menyita barang bukti narkoba dengan total mencapai 30,34 ton.

Pengungkapan kasus narkoba tersebut berlangsung sejak 1 Oktober hingga 15 November 2026.

“Selain narkotika, kami juga menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp1,2 miliar dan menangkap tujuh tersangka yang diduga sebagai bandar,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan dalam konferensi pers kepada awak media yang digelar pada Senin, 16 November 2026 lalu.

Rincian Barang Bukti Narkoba yang Disita Polda Sumut

Dalam pengungkapan selama 46 hari tersebut, Polda Sumut menyita berbagai jenis narkotika.

Barang bukti yang diamankan meliputi 172 kilogram sabu, 157 kilogram ganja, 150.012 batang pohon ganja, serta 30.510 butir pil ekstasi.

Polisi juga mengamankan 23.868 mililiter cairan yang mengandung narkotika.

Selain itu, petugas menyita uang tunai sebesar Rp1,2 miliar yang berkaitan dengan penanganan kasus narkotika.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut turut mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sejumlah perkara.

Kapolda Sumut menyebutkan, penyitaan barang bukti tersebut diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 93.469.666 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba dengan nilai ekonomis barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp3,36 triliun.

Adapun dalam video yang diunggah di Instagram pribadi milik Sonny, penangkapan tak berlangsung dengan mudah karena polisi harus mengejar pelaku hingga ke tengah laut.

Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

Sonny menegaskan pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian.

Menurutnya, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

“Kami memahami narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga merupakan ancaman terhadap generasi muda, keamanan, kesehatan masyarakat, serta masa depan bangsa,” ujarnya.

Oleh karena itu, Polda Sumut mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

“Kami akan terus memberantas dan menyikat habis narkoba-narkoba di wilayah Sumatera Utara,” pungkasnya.(*)

ACEH

Kapolda Aceh Patroli Bersepeda, Pastikan Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

Oleh Redaksi · 18 Nov, 23.35 WIB



BANDA ACEH – Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan melaksanakan patroli bersepeda dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di Kota Rabu (18/11/2026). Patroli bersepeda itu juga diikuti Dirsamapta Polda Aceh, Kabid Propam, Kabid TIK, serta personel Ditsamapta.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Aceh tidak hanya memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi serta …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Polres Aceh Barat Gandeng BUJP Buka Peluang Kerja Satpam

Oleh Biro Meulaboh · 18 Nov, 16.29 WIB

MEULABOH – Polres Aceh Barat terus memperluas upaya membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan melalui Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Kali ini, Polres menggandeng Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Provinsi Aceh untuk membuka akses kerja bagi masyarakat, khususnya di bidang jasa pengamanan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Satya Haprabu Polres Aceh Barat, Rabu (18/11/2026).

Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., yang memimpin langsung kegiatan itu mengatakan, POLIRAN merupakan salah satu Program Prioritas Kapolri sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap persoalan pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja.

Melalui program tersebut, Polri berupaya menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan atau badan usaha …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Imbas Proyek Raffi Ahmad Rp 14,7 Miliar di KKP, KPK Minta Seluruh Kementerian Evaluasi PBJ

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.03 WIB



BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut menyusul mencuatnya isu dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad dalam proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 14,7 miliar.

Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi. KPK mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksanaan proyek, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi.

Menurutnya, berbagai bentuk penyimpangan dapat terjadi dalam proses tersebut. Praktiknya bukan hanya berupa transaksi suap, melainkan juga dugaan benturan kepentingan hingga pemberian imbalan atau kickback dari pihak swasta.

"Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, potensi penyimpangan dalam sektor pengadaan juga tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK. Survei tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi.

"Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," ucapnya.

Karena itu, KPK mendorong setiap instansi pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan untuk melakukan pembenahan. Pemeriksaan terhadap proses pengadaan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari penentuan kebutuhan hingga realisasi anggaran.

"Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran," jelasnya.

Budi menekankan, tahapan perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikerjakan benar-benar diperlukan oleh kementerian atau lembaga bersangkutan. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.

"Ini penting untuk mengukur seberapa perlu, seberapa penting suatu instansi melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut," ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gus Ipul Bantah Uang Rp70 Miliar Mengalir ke NU: Fahd Arafiq Jangan Membual!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.47 WIB



BANDA ACEH - Wakil Ketua Umum memPBNU Saifullah Yusuf menyampaikan bantahan terkait adanya aliran uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).Bantahan pria yang biasa disapa Gus Ipul itu merespons pernyataan tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd Arafiq yang mengeklaim soal uang Rp70 miliar ke Muktamar NU.

"Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah," tegas Ipul saat dihubungi wartawan, pada Kamis, 19 November 2026.

Ipul mempersoalkan pernyataan Fahd lantaran yang bersangkutan bukan pengurus, panitia, serta peserta muktamar.

Dia pun lantas meminta Fahd agar tidak membual dan menyebarkan omong kosong.

"Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU. bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi," ujarnya.

"Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu," imbuhnya.

Gus Ipul pun mempersilakan Fahd untuk membuktikan pernyataannya agar terang-benderang.

"Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU," tegasnya.

Sebelumnya, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq menyampaikan pernyataan mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Fahd Arafiq yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut mengeklaim, memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Dia juga menyebut jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka.

Uang tersebut, kata dia, diberikan secara khusus untuk kepentingan organisasi NU.

"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," ungkapnya usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026 malam.

OPINI

Gibran Mundur bukan Berarti Bebas hukum

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.46 WIB

Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme hingga Kontroversi Fufufafa: Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan hukum.

Oleh: Syafril Sjofyan((Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FTA, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa))

ENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari seluruh persoalan yang selama ini membelitnya.

Justru sebaliknya, mundurnya Gibran harus menjadi momentum untuk membuka kembali berbagai dugaan pelanggaran hukum yang selama ini dipersoalkan masyarakat, tetapi belum memperoleh penyelesaian secara transparan dan tuntas.

Ada satu prinsip hukum yang tidak boleh dilupakan mundur dari jabatan tidak menghapus pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Jabatan boleh ditinggalkan, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Pertanyaannya, apakah setelah tidak lagi menduduki kursi Wakil Presiden, Gibran akan menghadapi proses hukum secara terbuka dan setara dengan warga negara lainnya? Ataukah pengunduran dirinya justru menjadi kesempatan untuk mengubur berbagai persoalan yang selama ini menggantung?

Persoalan paling serius adalah dugaan penggunaan dokumen Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Perkara ini tidak lagi semata-mata menjadi perdebatan Politik atau administratif. Pada 7 Oktober 2026, Aliansi Rakyat Menggugat melaporkan Gibran ke Bareskrim Polri atas dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan tidak benar terkait persyaratan pencalonan.

Perkembangan berikutnya menjadi semakin penting. Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah secara hukum. Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilu pada Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti adanya ijazah setara SMA milik Gibran.

Dua perkembangan hukum tersebut seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Jika dokumen yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pendidikan dinyatakan tidak sah, maka harus ditelusuri bagaimana dokumen itu diterbitkan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen tersebut digunakan, dan apakah terdapat unsur kesengajaan dalam proses penggunaannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Ekosistem Hiburan Digital Indonesia yang Terus Berkembang

Oleh Redaksi · 18 Nov, 22.09 WIB

BANDA ACEH - Indonesia punya komunitas pengguna internet yang sangat aktif. Pelajari cara masyarakat menikmati konten dan platform hiburan online masa kini.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan penggunaan internet yang sangat tinggi di Asia Tenggara, dan kebiasaan konsumsi hiburan digitalnya terus berubah. Mulai dari platform streaming video, aplikasi musik, hingga layanan interaktif yang diperuntukkan bagi pengguna dewasa, ragam pilihan hiburan online di Indonesia semakin luas. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya penetrasi smartphone dan jaringan internet yang semakin terjangkau di berbagai pelosok wilayah.

Transformasi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga cara mereka mengisi waktu luang. Hiburan yang dulu terbatas pada televisi dan bioskop kini hadir dalam genggaman, bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Pergeseran ini membentuk pola konsumsi baru yang menarik untuk dipahami lebih dalam.

Pasar hiburan digital Indonesia ditandai oleh keberagaman selera dan latar belakang pengguna. Wilayah yang sangat luas, dengan ratusan kelompok etnis dan bahasa daerah, menciptakan ekosistem konten yang kaya. Platform yang berhasil di Indonesia umumnya adalah yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, baik dari sisi bahasa, konten, maupun model harga.

Penetrasi mobile internet yang tinggi membuat sebagian besar konsumsi digital dilakukan lewat smartphone. Ini membentuk preferensi terhadap konten berformat pendek, antarmuka yang ringan, dan aplikasi yang tidak terlalu boros data. Di sisi lain, pengguna di kota-kota besar dengan akses internet cepat cenderung lebih terbuka terhadap platform berat seperti streaming video berkualitas tinggi atau game online dengan grafis detail.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Kantongi Fakta hingga Alat Bukti Baru Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 19 Nov, 12.56 WIB



BANDA ACEH - - Bareskrim Polri mengantongi fakta dan alat bukti baru di kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Temuan tersebut salah satunya diperoleh penyidik setelah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, fakta dan bukti baru yang dikantongi penyidik tidak hanya berasal dari penggeledahan rumah Eko Hadi.

"(Fakta dan bukti baru) tidak hanya (dari penggeledahan) itu," kata Susatyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Susatyo menambahkan, temuan tersebut akan dipaparkan dalam gelar perkara internal yang melibatkan Divisi Propam, Itwasum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Kompolnas, hingga saksi ahli.

Menurutnya, gelar perkara tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Fakta dan alat bukti yang diperoleh juga akan didalami guna menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

"Terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan. Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucap Susatyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.

Dalam perkembangan lainnya, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026). Polri kemudian menjatuhkan sanksi serupa kepada Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa (17/11/2026).

Peristiwa penyadapan tersebut diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Keempat tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keluarga Jokowi Tak Lagi Dilindungi Listyo, Mahfud MD: Perkara Hukum Bisa Dibuka

Oleh Redaksi · 19 Nov, 17.23 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai tumbangnya Listyo Sigit Prabowo membuka peluang bagi laporan-laporan hukum yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk kembali bergulir. Menurutnya, selama Listyo berkuasa, perkara-perkara tertentu sulit disentuh. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Rizal mengaitkan pembahasan ini dengan penyadapan yang disebut dilakukan di bawah Listyo saat ia masih menjabat Kapolri. Ia bertanya apakah persoalan hukum yang dulu muncul terhadap Jokowi bisa berkembang lagi setelah Listyo, yang selama ini dianggap kekuatan Jokowi, tumbang.

Mahfud menjawab bahwa kemungkinan itu sangat terbuka. "Itu sangat mungkin dimunculkan karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi," kata Mahfud.

Ia menyebut laporan Ubedilah Badrun sebagai contoh. "Bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti," ujarnya.

Mahfud menilai hambatan selama ini berkaitan dengan posisi Listyo di kepolisian.

"Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa," kata Mahfud.

Menurut dia, situasi kini berbalik. "Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa Listyo kini bahkan kesulitan menyelamatkan dirinya sendiri.

"Listyo itu dulu kan menyelamatkan orang lain semua. Sekarang enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri," lanjut Mahfud.

Mahfud juga menyebut pihak yang selama ini melindungi sudah tidak ada. Ia memakai istilah "bohir Politik" untuk menggambarkan sosok yang dulu dianggap menahan perkara tertentu.

Ia berharap pergantian ini membuat aparat kembali menjalankan hukum secara setara. "Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun," katanya.

LINGKUNGAN

Bahlil ternyata Teken Surat Ujung Kulon Jadi Daerah Tambang, Gusur Badak

Oleh Redaksi · 18 Nov, 19.55 WIB

BANDA ACEH -Kawasan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ikut menjadi sorotan setelah terungkap masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut ternyata sudah diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sejak Februari 2026.Dokumen yang dimaksud adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh Suara.com pada Rabu (18/11/2026), keputusan tersebut menetapkan wilayah pertambangan di Provinsi Banten yang terdiri atas tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Dari peta yang menjadi lampiran keputusan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kawasan berwarna krem yang menandakan Wilayah Usaha Pertambangan.

Artinya, kawasan laut yang berdekatan dengan salah satu benteng terakhir habitat badak Jawa tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan wilayah usaha pertambangan.

Dalam diktum KETIGA, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur bahwa Wilayah Usaha Pertambangan menjadi dasar bagi Menteri ESDM atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Cakupannya meliputi wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, hingga batuan.

Sementara itu, Wilayah Pertambangan Rakyat menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun Wilayah Pencadangan Negara dapat diusahakan melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

Namun, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan izin kepada perusahaan untuk langsung melakukan aktivitas eksploitasi.

Persoalan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon ternyata bukan baru muncul pada 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, sejak 2013.

Usulan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemerintah Provinsi Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

INTERNASIONAL

LIFE for Relief: Ribuan Perempuan dan Anak di Gaza Kehilangan Akses Pangan dan Layanan Kesehatan

Oleh telridi@lifeusa.org · 18 Nov, 19.09 WIB

Ribuan Janda, Perempuan, dan Anak Perempuan Menghadapi Kelaparan, Pengungsian, dan Hilangnya Akses terhadap Layanan Kesehatan

GAZA - Penderitaan perempuan di Jalur Gaza tidak lagi terbatas pada dampak perang dan menjadi janda di usia muda. Krisis kemanusiaan telah berkembang menjadi situasi yang semakin berat, memaksa ratusan ribu perempuan untuk menanggung sendiri tanggung jawab menghidupi keluarga dan merawat anak-anak mereka, di tengah pengungsian berulang, ketiadaan tempat tinggal yang layak, kekurangan pangan dan air bersih, serta memburuknya layanan kesehatan.

Laporan yang diterbitkan oleh UN Women mengungkapkan bahwa lebih dari 38.000 perempuan dan anak perempuan telah terbunuh sejak Oktober 2023, sementara lebih dari 172.000 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, sekitar 11.700 perempuan dan anak perempuan mengalami cedera berat yang mengakibatkan disabilitas permanen. Kondisi ini menambah beban jangka panjang bagi para perempuan penyintas dan keluarga mereka, terutama karena terbatasnya layanan rehabilitasi, pengobatan, dan perawatan khusus.

Untuk mengetahui lebih jauh kondisi kemanusiaan perempuan Palestina, kami menghubungi Vicki Roob, Direktur Departemen Program Internasional di LIFE for Relief and Development, yang meraih peringkat kelima sebagai salah satu organisasi terbaik yang bekerja di Palestina selama perang, berdasarkan penilaian Charity Navigator.

Vicki menjelaskan besarnya penderitaan yang dialami perempuan Palestina:

"Di antara perubahan sosial paling menonjol yang diungkapkan oleh UN Women adalah kenyataan bahwa sekitar 86.290 keluarga di Gaza kini dikepalai oleh perempuan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mastermind Penyadapan Prabowo tak Bisa Sembunyi, Bukti Ini Jadi Kunci!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.19 WIB



BANDA ACEH - Sosok yang diduga menjadi dalang atau aktor intelektual di balik dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tetap bisa diungkap meski tidak turun langsung menjalankan operasi.Peran pihak yang mengatur, memberikan perintah, hingga mengendalikan aktivitas di lapangan dapat ditelusuri melalui rangkaian alat bukti. Hal itu disampaikan, Pemerhati Kepolisian sekaligus mantan Komisioner Kompolnas periode 2016-2020 dan 2020-2024, Poengky Indarti.

Poengky mengatakan penyidik harus menelusuri keterlibatan setiap pihak berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Terkait adanya dugaan mastermind tidak turun langsung, melainkan berperan mengatur dan mengarahkan operasi, pastilah akan dapat ditelusuri penyidik melalui alat-alat bukti yang ada," kata Poengky saat dihubungi inilah.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut dia, pembuktian dugaan makar tidak bisa hanya bertumpu pada asumsi mengenai siapa yang berada di balik operasi. Penyidik harus mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli, serta petunjuk yang saling menguatkan.

Poengky juga menekankan pentingnya pendekatan scientific crime investigation dalam proses penyidikan. Pendekatan tersebut diperlukan agar hasil pengungkapan perkara memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan ketika dibawa ke pengadilan.

"Intinya, penyidik harus dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur pasal makar. Jika ada unsur yang tidak terbukti, maka pasal makar juga dianggap tidak terbukti," tegasnya.

Kasus dugaan makar ini menjadi perhatian setelah Polri mendalami dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghilangan dokumen elektronik yang dikaitkan dengan upaya pengumpulan informasi terhadap Presiden Prabowo.

Agenda Prabowo di KTT APEC 2026 Shenzhen Hari Ini, Bertemu Xi Jinping hingga Bahas CEPA

Dalam perkembangan penanganannya, Polri juga mendalami dugaan tindak pidana makar sebagai perkara tersendiri. Penyidik perlu mengurai hubungan antara pihak yang diduga menjalankan operasi dengan mereka yang berpotensi memberikan arahan atau mengendalikan kegiatan tersebut.

Penelusuran terhadap aktor intelektual menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan perintah. Namun, keterlibatan setiap pihak tetap harus dibuktikan berdasarkan peran dan unsur pidana yang terpenuhi.

Poengky mengingatkan agar proses penyidikan berjalan profesional, mandiri, dan akuntabel. Dia meminta tidak ada tekanan, beban, maupun intervensi terhadap penyidik karena dapat mengganggu proses penegakan hukum atau due process of law.

Di sisi lain, dia mendorong Polri menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala melalui konferensi pers.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jelang Sidang Listyo Sigit, Kapolri Ubah Aturan Etik: Jenderal Junior Bisa Mengadili Senior!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.06 WIB



BANDA ACEH - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi Polri menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perubahan paling mencolok, perwira dengan pangkat lebih rendah kini diperbolehkan menjadi anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang mengadili perwira lebih senior.Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Regulasi itu disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026, atau menjelang agenda sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan pekan depan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan baru tersebut. Dia bahkan mengakui agenda sidang etik mantan Kapolri menjadi salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi.

"Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," kata Isir di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Komposisi Keanggotaan KKEP

Perubahan signifikan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai komposisi keanggotaan KKEP. Dalam ketentuan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.

Namun, aturan terbaru memperluas komposisi tersebut. Anggota KKEP kini dapat berasal dari perwira berpangkat satu tingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

"Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," ujar Isir.

Ketentuan serupa juga diberlakukan terhadap KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat 3. Artinya, perbedaan senioritas kepangkatan tidak lagi menjadi penghalang bagi anggota Polri untuk duduk dalam majelis yang memeriksa perkara etik perwira lebih tinggi.

Jenderal Bintang Empat

Perubahan ini menjadi sorotan karena Listyo Sigit merupakan jenderal bintang empat. Dengan ketentuan baru tersebut, majelis etik yang memeriksa mantan Kapolri itu tidak harus seluruhnya berasal dari perwira berpangkat setara atau lebih tinggi.

Selain komposisi majelis, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur perubahan mekanisme persidangan. Pasal 59 ayat 2 kini memungkinkan sidang KKEP dihadiri terduga pelanggar secara langsung maupun melalui media elektronik, sepanjang mendapat persetujuan Ketua KKEP.

Aturan masa penempatan khusus (patsus) juga berubah. Jika sebelumnya maksimal 30 hari kerja, kini dibatasi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

Viral Aduan Siswi SMPN di Surabaya, Ungkap Ada Guru Minta Turunkan Celana Dalam untuk Periksa Menstruasi

Oleh Van · 18 Nov, 16.56 WIB

SURABAYA — Heboh di media sosial mengenai pemeriksaan menstruasi pada siswi di SMPN 21 Surabaya.

Salah satu siswi melakukan pengaduan kepada Wali Kota Eri Cahyadi mengenai prosedur gurunya memeriksa murid yang sedang menstruasi.

Dalam aduannya, siswi tersebut merasa tidak nyaman karena harus menurunkan celana dalam.

Oknum guru yang melakukan pemeriksaan tersebut, dalam unggahan video di Instagram Eri, mengakui bahwa prosedur tersebut adalah kebijakannya.

“Ada trik-trik dari tahun-tahun lalu, kita berlakukan cara ini, kalau banyak yang tidak salat, kita curiga. Nah, kita pakai trik sendiri,” ujar oknum tersebut, dikutip dari video di akun Instagram @erichayadi_ pada Rabu, 18 November 2026.

Kumpulkan Siswi yang Mengaku Menstruasi dalam Satu Kelas

Lebih lanjut, ia mengaku bahwa para siswi tersebut dikumpulkan dalam satu kelas sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Karena kita wanita semua, jadi kita kelompokkan satu kelas. Kita tutup, ada sentuhan pantat dan kita akan lihat, ‘Oh iya ini haid, sudah,’” jelasnya

“Dan dia mengatakan ekspresinya haid, kan kelihatan anaknya. Kalau yang tidak haid, anaknya akan bilang kalau dia belum mandi besar. Jadi, dia mundur, belum disentuh,” sambungnya.

Selanjutnya, oknum guru yang tak disebutkan namanya itu menyebut bahwa siswi diminta untuk sedikit menurunkan celana dalamnya saat diperiksa.

“Dia (siswi) hanya melepaskan (celana) sedikit saja. Enggak sampai penuh ke bawah, sampai itu kelihatan ada bercak (atau tidak),” paparnya.

Mengaku Hanya untuk Sidak dan Aturan Oknum Guru

Saat ditanya mengenai alasan melakukannya, oknum guru itu menyebut bahwa tindakannya seperti inspeksi mendadak (sidak) kepada siswi.

“Itu untuk sidak aja, sidak sesaat. Saat itu aturan dari saya untuk mendidik,” tuturnya.

Tak hanya untuk sidak, oknum guru juga mengaku bahwa prosedur tersebut dilakukan untuk melatih kejujuran para siswi.

“Tidak ada motif lain-lain, hanya melatih kejujuran anak saja dan hanya melakukan saat itu saja,” lanjutnya.

Aduan Siswi pada Wali Kota Surabaya

Prosedur ini terkuak saat salah satu siswi mengadu langsung dengan mengirim pesan kepada Eri Cahyadi.

Pesan tersebut mengungkap bahwa awalnya sekolah punya absensi untuk siswi yang sedang menstruasi dan pemeriksaan dilakukan dengan cara meraba …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kapolres Aceh Barat Apresiasi Personel Pengungkap BBM Subsidi dan Curanmor

Oleh Biro Meulaboh · 18 Nov, 16.03 WIB

MEULABOH– Sejumlah personel Polres Aceh Barat menerima penghargaan dari Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, S.H., S.I.K., atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam upacara di halaman Mapolres Aceh Barat, Rabu (18/11/2026) pagi, yang dipimpin langsung oleh Kapolres selaku Inspektur Upacara. Kegiatan itu diikuti pejabat utama, perwira, serta personel Polres Aceh Barat dan Polsek jajaran.

Pemberian penghargaan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolres Aceh Barat Nomor KEP/21/XI/2026 tanggal 17 November 2026 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kerja keras, dan prestasi anggota dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Adapun penerima penghargaan di antaranya AKP Deno Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Kasat Reskrim, dan IPDA Masykur, S.H., selaku Kaurbinopsnal Satreskrim, atas keberhasilan mengungkap kasus penyalahgunaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi UU!

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.12 WIB



BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang (UU).

Keputusan itu diambil Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026.

Adapun, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliyati, dan Saan Mustopa.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu melaporkan proses pembahasan Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Selanjutnya, Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan pengesahan RUU yang sudah 18 tahun mandek di DPR tersebut.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan kompak.

Saat pembicaraan tingkat satu, Ketua Panja RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Habiburokhman menjelaskan Komisi III DPR telah membahas bersama pemerintah 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

Komisi III DPR juga telah menggali saran, aspirasi dan masukan masyarakat serta ahli. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset yang partisipatif dan berkeadilan.

Habiburokhman memaparkan 10 hasil pokok pembahasan RUU Perampasan Aset. Pertama adalah mengenai judul, prinsip dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai dan kriteria perampasan aset tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Masuk di dalamnya tindak pidana penipuan atau penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak.

"Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," sambung Habiburokhman.

Ketiga, penegasan tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

LINK Konten Berbayar Video Ce Crystine Bertarif Rp 181 Ribu Per Bulan, Apa Benefitnya?

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.15 WIB

BANDA ACEH - Nama kreator TikTok Ce Crystine tengah menjadi perhatian publik setelah terseret kasus dugaan penjualan konten bermuatan pornografi.Perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tersebut bersama suaminya diduga memperoleh pendapatan hingga Rp400 juta dari aktivitas bisnis digital yang telah berlangsung sejak Maret 2025.

Kasus ini terungkap setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar Kota melakukan patroli siber dan menemukan materi yang diduga mengandung unsur pornografi di sebuah situs internet. Penyelidikan kemudian mengarah kepada K (38), yang dikenal dengan nama Ce Crystine, serta suaminya PEK (40).

Keduanya akhirnya ditangkap polisi di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali, setelah diduga menjalankan aktivitas tersebut hingga November 2026.

Sebelum kasus ini mencuat, Ce Crystine dikenal sebagai kreator konten melalui akun TikTok @ce.crystine. Akun tersebut memiliki sekitar 178,3 ribu pengikut dengan sejumlah unggahan yang berhasil menjangkau jutaan penonton.

Konten yang dipublikasikannya banyak mengangkat humor bernuansa dewasa, rayuan, serta interaksi menggunakan istilah budhe dan berondong. Salah satu unggahannya bahkan dilaporkan memperoleh sekitar 1,2 juta tayangan.

Meski demikian, popularitas akun TikTok tersebut berbeda dengan perkara hukum yang kini sedang ditangani kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pasangan tersebut diduga memiliki peran masing-masing dalam menjalankan bisnis konten digital.

K disebut bertanggung jawab memproduksi foto dan video bermuatan pornografi dengan dirinya sebagai pemeran. Proses perekaman dilakukan menggunakan telepon seluler dan tripod.

Sementara itu, PEK diduga mengelola akun media sosial, situs berlangganan, serta proses pemasaran dan pengunggahan materi kepada pelanggan. Keduanya juga disebut memanfaatkan fitur siaran langsung untuk menarik calon konsumen.

Konten tersebut dipasarkan menggunakan sistem keanggotaan berbayar. Setiap pelanggan dikenakan tarif 10 dolar AS atau setara sekitar Rp181 ribu untuk akses selama satu bulan.

Materi baru dikabarkan diunggah secara rutin sedikitnya dua kali dalam sepekan. Dari kegiatan tersebut, pasangan ini diduga memperoleh pemasukan sekitar Rp20 juta hingga Rp30 juta setiap bulan.

Jika dihitung selama kurang lebih 20 bulan, akumulasi omzet bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp400 juta.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan bahwa persoalan ekonomi diduga menjadi salah satu alasan pasangan tersebut menjalankan aktivitas tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco hingga Teddy Jadi Sasaran Black Campaign, Ada Upaya Lemahkan Lingkaran Prabowo

Oleh Redaksi · 19 Nov, 10.47 WIB



BANDA ACEH -Simpul Aktivis Gerakan 98 (Siaga 98) mencium indikasi praktik kampanye hitam atau black campaign terhadap sejumlah figur yang berada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Serangan berupa berbagai tudingan dan kontroversi tersebut dinilai berpotensi merusak reputasi sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap orang-orang dekat Kepala Negara.

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, secara khusus menyoroti munculnya tudingan yang mengaitkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dengan isu judi online (judol) dan doxing.

Hasanuddin menilai, kemunculan isu tersebut perlu dicermati secara kritis karena berpotensi bukan sekadar kritik Politik biasa, melainkan bagian dari upaya menjatuhkan reputasi Dasco.

"Di tengah menguatnya aspirasi dan dukungan sejumlah kalangan yang mendorong Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur potensial untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI apabila terjadi perubahan politik terkait posisi Gibran Rakabuming Raka, muncul berbagai tudingan yang mengaitkan nama Dasco dengan isu judi online (judol) dan doxing," kata Hasanuddin kepada RMOL, Kamis, 19 November 2026.

Menurut dia, setiap tuduhan terhadap seseorang harus memiliki dasar bukti dan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seseorang dihakimi hanya berdasarkan opini maupun pembentukan persepsi di ruang publik.

"Kami melihat adanya indikasi bahwa serangan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan semata-mata kritik politik biasa, melainkan berpotensi menjadi bagian dari praktik black campaign yang bertujuan merusak reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap dirinya," tegas Hasanuddin.

Ia juga mengingatkan agar tudingan yang belum terverifikasi tidak langsung dianggap sebagai kebenaran.

"Tidak boleh ada seseorang yang dihakimi melalui opini, framing, maupun pembentukan persepsi di ruang publik sebelum ada fakta yang jelas," ujarnya.

Hasanuddin menyatakan Siaga 98 percaya Dasco tidak terlibat dalam praktik judol maupun tindakan doxing sebagaimana tudingan yang beredar. Ia juga menilai jabatan Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan tersebut.

Lebih jauh, Siaga 98 melihat pola serangan terhadap Dasco memiliki kemiripan dengan kontroversi yang sebelumnya diarahkan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Hasanuddin menilai, kemunculan berbagai isu yang menyasar figur-figur dekat Prabowo tersebut patut menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kepercayaan publik kepada lingkaran pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OTOMOTIF

Misterius! Mobil Innova Bergerak Maju-Mundur Tanpa Sopir, Ini Cerita Pemilik

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.24 WIB

BANDA ACEH - Pemilik mobil Innova putih yang viral karena berjalan mundur dan maju tanpa pengemudi di parkiran rumahnya di Desa Guyangan, Bangsri, Jepara, buka suara soal kejadian tersebut. Ia mengaku sudah menarik tuas rem tangan saat memarkir mobil itu."Kejadian di rumah, Jumat (13/11) malam, jam 18.30 WIB. Itu habis keluar sebentar tapi sebelum magrib di rumah. Parkirnya cukup lama. Itu saya sudah hand rem, kalau lupa pasti langsung jalan," kata Tomi Adi Setiawan, warga Desa Guyangan saat dihubungi lewat telepon, Selasa (17/11/2026).

"Pas (mobil) jalan sendiri itu nggak ada yang lihat. Itu nggak ada sopirnya, terus ada ibu saya, terus teriak-teriak Itu. Kondisi mesin mati, kunci ada di dalam rumah juga," imbuh dia.

Tomi memastikan video tersebut asli dari rekaman CCTV.

"Itu video asli, bukan editan, bukan. Awalnya mundur. Cuma rekaman CCTV hitam putih, biasanya berwarna," ujar dia.

Tomi menduga mobilnya jalan sendiri tanpa pengemudi karena kondisi jalan yang melengkung.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD Minta Wajah Listyo Ditampilkan

Oleh Redaksi · 19 Nov, 09.05 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyindir proses sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo.

Ia menyebut masyarakat sudah "kangen" melihat sosok Listyo dan mengusulkan agar Mabes Polri menampilkan wajah Kapolri tersebut ke hadapan publik saat menjalani sidang etik.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menyinggung sidang etik yang menurutnya akan digelar pekan ini. Ia terlebih dahulu mengungkapkan usul agar Listyo diberhentikan dari kepolisian sebelum proses pidana berjalan.

Menurut Mahfud, status Listyo saat ini masih membuatnya memiliki sejumlah hak dan fasilitas sebagai jenderal, termasuk rumah dinas dan pengawalan.

"Memang kita usul semua itu dipecat dulu, pidananya nanti. Sekarang dia kan masih jenderal, masih punya hak rumah, punya hak dikawal," kata Mahfud dikutip Kamis (19/11/2026).

Mahfud kemudian menyampaikan sindiran yang disertai tawa. Ia secara terbuka meminta Mabes Polri menampilkan wajah Listyo kepada masyarakat ketika menjalani sidang etik.

"Sebenarnya sih, kalau boleh usul nih saya kepada Mabes Polri, ini rakyat sudah kangen ngelihat Pak Listyo ini," ujarnya.

"Jadi kalau saat diadili nanti di komisi etik besok atau besok lusa itu, saya usul ditampilkanlah wajahnya. Kita sudah kangen untuk bilang, hai," sambungnya.

Tak berhenti di situ, Mahfud juga mengaku ingin melihat Listyo diperlakukan sebagaimana pihak lain yang berhadapan dengan proses hukum.

"Saya ingin lihat wajah dia ketika dia diborgol, lalu berjalan menuju peradilan etik itu," kata Mahfud.

Dengan nada menyindir, Mahfud kembali menyebut masyarakat merindukan sosok yang ia sebut sebagai orang yang "sangat baik hati" tersebut.

Menanggapi pernyataan Mahfud, Rizal Mustary mengatakan persoalannya bukan semata-mata kerinduan publik, melainkan menyangkut kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.

Menurut Rizal, orang-orang yang berurusan dengan hukum biasanya diperlihatkan kepada publik dalam kondisi diborgol dan mengenakan rompi. Namun, para perwira yang terseret dalam perkara ini tidak pernah terlihat dengan perlakuan serupa.

Rizal kemudian membandingkannya dengan Ferdy Sambo. Ia menyebut Sambo tetap dituntun dalam kondisi diborgol ketika memasuki ruang sidang, meskipun substansi pemeriksaannya tertutup.

Mahfud sependapat dengan Rizal. Ia kembali melontarkan sindiran dengan mengingatkan kemunculan Listyo di hadapan publik yang dahulu kerap terlihat setiap hari, bahkan hingga tengah malam.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Namanya Banyak Disebut sebagai Pengganti Wapres, KDM Menolak dan Usulkan Dasco

Oleh Redaksi · 19 Nov, 13.00 WIB



BANDA ACEH - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengaku namanya turut disebut sejumlah pengamat hingga warganet sebagai sosok yang berpotensi mengisi jabatan wakil presiden. Namun, KDM menegaskan tidak tertarik dan memilih fokus menuntaskan tugasnya sebagai gubernur.

Sebagai alternatif, KDM justru mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk mengisi posisi wakil presiden yang masih menyisakan masa jabatan tiga tahun.

"Saat ini banyak orang, pengamat, warganet yang membicarakan kekosongan jabatan wakil presiden. Nama saya banyak disebut juga oleh pengamat, muncul di berita, bahkan menjadi pembicaraan di media sosial," kata Dedi dalam video yang disampaikan kepada publik, Kamis (19/11).

Namun ia menegaskan tidak ingin terlibat dalam pembicaraan mengenai pengisian jabatan tersebut. Ia memilih berkonsentrasi menjalankan tanggung jawabnya memimpin Jawa Barat.

"Saya tegaskan bahwa saya berfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai gubernur," ucapnya.

Kader Gerindra itu pun kemudian menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad atau yang akrab disapa Bang Dasco sebagai figur yang menurut pandangannya layak dipertimbangkan. Ia menilai Dasco selama ini kerap tampil dalam penyelesaian berbagai persoalan nasional.

Menurut Dedi, Dasco juga memiliki peran dalam membangun hubungan harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, Dasco disebut mampu menjadi mediator antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan berbagai kalangan.

"Menurut saya figur ini layak untuk mengisi jabatan wakil presiden yang sisa masa jabatannya tiga tahun ke depan," ungkapnya.

Meski begitu, KDM menegaskan usulan tersebut merupakan pendapat pribadinya. Keputusan mengenai pengisian jabatan wakil presiden tetap berada dalam kewenangan konstitusional presiden dan MPR.

"Tetapi semua keputusannya tentu kita menghormati keputusan presiden dan pilihannya ada di MPR. Ini adalah pendapat yang bersifat pribadi, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing," pungkas KDM.

OPINI

Hashim, Adik Prabowo Pilihan Ideal Pengganti Gibran

Oleh Redaksi · 18 Nov, 15.46 WIB

Oleh: Hamdi Mustapa

I tengah dinamika Politik menjelang dan selama masa pemerintahan Prabowo Subianto, wacana pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terus bergulir.

Nama-nama dari koalisi maupun luar muncul, namun satu sosok yang paling masuk akal, paling loyal, dan paling minim risiko adalah Hashim Sujono Djojohadikusumo—adik kandung Prabowo sendiri.

Hashim bukan politisi yang tiba-tiba muncul. Ia adalah penopang utama perjalanan politik kakaknya sejak awal.

Partai Gerindra didirikan pada 2008, dan Hashim berada di posisi Wakil Ketua Dewan Pembina sejak hari pertama. Bahkan nama "Gerindra" sendiri lahir dari gagasannya bersama lingkaran dekat.

Sejak itu ia bekerja di belakang layar: merumuskan arah partai, menjaga jaringan, hingga membiayai kampanye dan perjalanan politik Prabowo dalam berbagai kontestasi.

Ia memilih peran penopang ketimbang mengejar jabatan elektoral sendiri. Itulah bukti perjalanan politik yang panjang dan konsisten di Gerindra.

Loyalitas Hashim sulit dibantah. Hubungan darah plus rekam jejak mendukung bisnis dan politik kakaknya selama bertahun-tahun membuatnya hampir mustahil berkhianat.

Tidak ada kepentingan pribadi yang lebih besar daripada menjaga keberhasilan pemerintahan Prabowo.

Sebagai adik yang selama ini menjadi "benteng kepercayaan keluarga", Hashim memahami betul visi, program, dan gaya kepemimpinan sang Presiden. Ia sudah terlibat dalam perumusan platform Gerindra sejak awal dan kini memegang peran strategis di pemerintahan—sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan.

Posisi-posisi ini membuatnya langsung memahami dan menjalankan program prioritas seperti transisi energi, ketahanan iklim, dan percepatan pembangunan perumahan. Tidak perlu adaptasi panjang; ia sudah "sejiwa" dengan arah kebijakan Presiden.

Keunggulan lain yang krusial adalah absennya rivalitas di 2029. Hashim sudah berusia 72 tahun (lahir 1954) dan sepanjang karier-nya tidak pernah menunjukkan ambisi menjadi calon presiden.

Perannya selalu mendukung, bukan bersaing. Jika ia menjadi cawapres, fokusnya jelas: menstabilkan pemerintahan dan memastikan kelanjutan program Prabowo, bukan menyiapkan diri sebagai pesaing di pemilu berikutnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Pemerintah Aceh Dorong ICMI Perkuat Peran dalam Mitigasi Bencana dan Pembangunan

Oleh Redaksi · 18 Nov, 14.53 WIB

BANDA ACEH, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Aceh untuk memperkuat kontribusi dalam mitigasi bencana, pemulihan pascabencana, dan pembangunan berkelanjutan melalui kajian ilmiah, inovasi, serta rekomendasi kebijakan.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, pada pelantikan Pengurus ICMI Orwil Aceh periode 2026–2031 yang dirangkai dengan seminar nasional di Hotel Muraya, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema "Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan dan Keberlanjutan Pembangunan".

Dalam sambutannya, gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus ICMI Orwil Aceh yang baru dilantik. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian.

Menurut gubernur, ICMI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para cendekiawan Muslim yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa.

Karena itu, ICMI diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan pemikiran, inovasi, dan rekomendasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gubernur menilai tema seminar nasional tersebut relevan dengan kondisi Aceh, terutama setelah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025. Dampak bencana tersebut hingga kini masih menjadi tantangan dalam proses pemulihan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Usman Hamid Minta Polisi Periksa Jokowi soal Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 19 Nov, 09.09 WIB



BANDA ACEH - Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai pengguna akhir (end-user) dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, polisi masih membuka kemungkinan adanya pihak lain yang menggunakan hasil penyadapan tersebut.

Perkembangan ini menjadi sorotan setelah Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak polisi menelusuri pihak yang berada di balik operasi penyadapan tersebut. Usman bahkan mendorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) diperiksa.

Usman menilai pengusutan perkara tidak cukup hanya menyasar para pelaku di lapangan. Polisi harus mengungkap siapa yang memerintahkan penyadapan dan untuk kepentingan siapa informasi yang diperoleh digunakan.

"Saya kira end-user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa, karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik, di hadapan para relawan Pro Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis Militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh Politik, nah itu menjelang pemilu," kata Usman dalam diskusi media bertajuk Skandal Penyadapan, Intervensi Politik dan Ancaman Terhadap Integritas Pemilu, dikutip Kamis (19/11/2026).

Usman menilai pengakuan Jokowi mengenai penggunaan informasi intelijen untuk memantau tokoh politik perlu menjadi perhatian. Menurutnya, intelijen negara semestinya digunakan untuk kepentingan keamanan, pertahanan, dan penegakan hukum, bukan mengawasi aktivitas politik masyarakat.

"Partai politik, di parlemen, yang seharusnya menjadi pengawas, pengontrol, pengguna, itu justru sebaliknya, menjadi pihak yang diawasi," ujarnya.

Usman juga mengungkap laporan Amnesty mengenai pembelian sejumlah perangkat penyadapan pada 2017-2023, atau selama pemerintahan Jokowi. Perangkat yang disebut dalam laporan tersebut antara lain Predator, Pegasus, dan FinFisher.

Pembelian itu disebut melibatkan perantara perusahaan di Singapura dan NSO Group asal Israel. Amnesty mengaku telah meminta klarifikasi kepada kepolisian pada 2024 terkait temuan tersebut.

"Mengingat catatan Amnesty menunjukkan pembelian ini berlangsung sejak 2017 sampai 2023 maka penyadapan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Joko Widodo," ungkapnya.

Polisi Telusuri Pengguna Lain

Sementara itu, Mabes Polri menyatakan masih mendalami kemungkinan adanya pengguna akhir selain Listyo Sigit dalam kasus penyadapan ilegal tersebut.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mengusut perkara tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bakom Beri Kode Wapres Suka Pempek, Begini Respons Santai Sufmi Dasco

Oleh Redaksi · 19 Nov, 12.49 WIB



BANDA ACEH -Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, mengenai sosok calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disebut suka makan pempek, direspons santai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco juga mengaku menyukai sejumlah makanan khas Nusantara mulai dari gado-gado, nasi uduk, tekwan, pempek hingga gudeg.

"Saya suka makan gado-gado, pertama. Saya kemudian suka makan nasi uduk. Saya juga suka makan tekwan. Nah, saya juga suka makan pempek, gitu," kata Dasco, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Dasco juga menegaskan bahwa dirinya sangat menyukai beragam kuliner dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

"Saya Indonesia. Gudeg juga suka. Saya suka ke Jogja makan gudeg," katanya.

Diberitakan RMOL Sumsel, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan memberikan isyarat menarik terkait sosok calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Saat ditanya mengenai sosok yang bakal mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut, Syahganda justru menyebut ciri-ciri yang berkaitan dengan kuliner khas Palembang.

Ia meminta masyarakat bersabar dan mendoakan agar sosok pengganti Gibran merupakan figur yang selama ini diketahui menyukai pempek.

"Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek," kata Syahganda saat menghadiri Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia 2026 di Palembang, Rabu, 18 November 2026.

Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian karena disampaikan di tengah menguatnya spekulasi mengenai sejumlah nama yang berpeluang menggantikan Gibran.

Sejauh ini, terdapat tiga nama elite Partai Gerindra yang mencuat dalam bursa calon Wapres. Mereka adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

NASIONAL

Sjafrie Sjamsoeddin Sambangi Gedung DPR Temui Dasco, Ada Apa?

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.59 WIB



BANDA ACEH -Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis siang, 19 November 2026.

Pantauan RMOL di lokasi, Sjafrie tiba di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, sekitar pukul 13.55 WIB.

Sjafrie tiba mengenakan baju safari berwarna cokelat, dan langsung menuju lift untuk menuju ruang pimpinan DPR.

Tak ada pernyataan yang disampaikan oleh Sjafrie terkait kedatangannya di Gedung DPR.

Namun, berdasarkan info yang beredar, Sjafrie datang ke Gedung DPR untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Lantai 4, Gedung Nusantara III.

Hingga berita ini diturunkan, Sjafrie dikabarkan masih menggelar pertemuan tertutup dengan Dasco di ruangannya.

Belum diketahui pasti dalam rangka apa dan membahas apa pertemuan antara Sjafrie dan Dasco tersebut.

NASIONAL

Bisa Seret Keluarga Jokowi, Mahfud Minta KPK Tindaklanjuti Laporan Ubedilah Badrun dan Kasus Blok Medan

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.12 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah lama diterima.Dua di antaranya adalah laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan TPPU dan KKN serta perkara yang dikenal dengan istilah “Blok Medan”.

Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026). Menurut dia, laporan yang sudah disertai bukti semestinya diproses lebih lanjut oleh KPK.

Ia mencontohkan laporan Ubedilah Badrun. Seperti diketahui, Ubedilah pada 10 Januari 2022 melaporkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan dua anak Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan laporan tersebut telah diterima secara resmi oleh KPK. Ia juga menyebut Ubedilah telah menyerahkan bukti-bukti yang kemudian diuraikan melalui berbagai media dan podcast.

“Taruhlah contoh yang dilaporkan Ubedilah Badrun itu kan sudah lama diterima secara resmi oleh KPK. Badrun sudah menyampaikan bukti-buktinya, bahkan bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” kata Mahfud.

Selain laporan Ubedilah, Mahfud menyinggung perkara “Blok Medan”. Ia menyebut istilah tersebut pernah disampaikan seorang gubernur untuk merujuk pada jatah dalam jumlah tertentu.

Ketika Rizal menanyakan harapannya terhadap KPK, Mahfud menduga lembaga antirasuah itu masih ragu untuk bergerak. Ia mengaitkan keraguan tersebut dengan kepastian sikap pimpinan kepolisian dalam penanganan perkara.

“Saya berharap KPK sih masih takut kali, belum yakin bahwa Kapolrinya sudah betul-betul on untuk itu,” ujarnya.

Mahfud menilai KPK perlu mendapatkan kepastian arah dari pucuk pemerintahan. Dalam perbincangan tersebut, Rizal juga menyebut kemungkinan kejaksaan masih menunggu sinyal dari presiden.

Mahfud menambahkan, sejumlah perkara masih menumpuk di KPK. Termasuk di antaranya kasus yang menyeret para menteri yang disebutnya mangkir dari panggilan.

Meski menyampaikan sejumlah kritik, Mahfud mengapresiasi kinerja KPK dalam penindakan korupsi di daerah. Ia menilai lembaga tersebut aktif menangani perkara yang melibatkan anggota DPRD, bupati, dan kepala dinas.

Namun, menurut Mahfud, para pihak yang ditindak umumnya tidak memiliki pelindung politik yang kuat.

“Yang mereka enggak punya patron ditangkap semua, atau patronnya kecil-kecilan lah. Nah, sekarang yang besar-besar ini supaya dibuka lagi,” kata Mahfud.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo Hari Ini

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.58 WIB



BANDA ACEH - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Cs, Kamis (19/11/2026).

"Ya, kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro.

Susatyo menambahkan, dalam proses gelar perkara, pihaknya bakal melibatkan ahli untuk menguatkan konstruksi kasus dugaan makar tersebut.

"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," tuturnya.

Namun, dia belum dapat berbicara panjang lebar mengenai hal tersebut. Pasalnya, hasil gelar perkara akan disampaikan lebih lanjut.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh Politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun

NASIONAL

Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs, Bareskrim Gelar Perkara Hari Ini Libatkan Saksi Ahli

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.08 WIB



BANDA ACEH - Bareskrim Polri akan menggelar perkara kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya, Kamis (19/11/2026).

Gelar perkara yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tersebut turut berkaitan dengan perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pembahasan dilakukan bersama tim internal dan melibatkan sejumlah saksi ahli.

Keterlibatan para ahli diperlukan untuk membantu penyidik menyusun konstruksi hukum dalam perkara dugaan makar tersebut.

"Ya, kami besok (hari ini) akan melaksanakan gelar bersama tim internal," kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, hasil pembahasan bersama para ahli nantinya akan menjadi bahan pendalaman penyidik sebelum disampaikan kepada publik.

"Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ungkapnya.

Meski demikian, Susatyo belum membeberkan secara terperinci materi yang akan dibahas dalam gelar perkara tersebut.

Kasus Dugaan Makar Sudah Naik Penyidikan

Sebelumnya, Polri telah mengumumkan peningkatan status perkara dugaan makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan.

Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berkomitmen mengusut perkara tersebut.

Komitmen itu diwujudkan dengan membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Namun, Isir belum menjelaskan secara terperinci perkembangan penyidikan, termasuk mengenai penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.

Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah petinggi Polri bertemu dengan Menko Polkam Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

"Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir.

Ia menegaskan, penyidikan dugaan makar tersebut merupakan pengembangan dari laporan awal yang berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, hingga pemusnahan alat bukti elektronik

NASIONAL

Nama Dasco Menguat Jadi Wapres Pengganti Gibran, Sjafrie Ungkap Isi Pertemuan

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.07 WIB



BANDA ACEH - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan tidak ada isu terkait calon wakil presiden atau cawapres yang dibahas saat bertemu Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11/2026) siang ini.

Hal ini dikonfirmasi usai Sjafrie bertemu Dasco secara tertutup. Diketahui, nama Dasco menguat dalam bursa cawapres.

“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu, ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie.

Sjafrie menegaskan, pertemuannya dengan Dasco hanya membahas terkait tugas-tugasnya menyangkut urusan di bidang yang dia emban.

“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian, yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait banyaknya dukungan kepadanya untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Dia pun mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan pilihan calon wapres.

"Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Dasco mengatakan, Presiden memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan figur calon wapres kepada MPR

NASIONAL

Masalah Gibran Belum Selesai meski Sudah Mundur

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.41 WIB



BANDA ACEH -Terdapat dua pandangan di lingkungan DPR mengenai polemik yang menyangkut posisi Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatan Wapres. Sebagian menganggap persoalannya telah selesai, sementara pihak lain melihat masih terdapat persoalan hukum yang perlu dituntaskan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan penggunaan dokumen yang dipersoalkan keabsahannya dalam proses pencalonan Wapres pada Pemilu 2024.

Selain itu, Amir mengingatkan adanya laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Ubedilah Badrun kepada KPK terkait Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep pada Januari 2022.

"Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengisian jabatan Wapres tidak dapat dipisahkan dari persoalan legitimasi, konstitusi, dan kepercayaan publik," kata Amir, dikutip Kamis 19 November 2026.

Persoalan lain yang menurut Amir perlu diperhitungkan adalah isu penyadapan dan dugaan adanya upaya makar terhadap Prabowo.

Dinamika intelijen dan keamanan negara, menurutnya, harus menjadi bagian dari pertimbangan ketika Presiden menentukan calon pendampingnya.

Apalagi apabila benar terdapat persaingan kekuatan Politik dan ekonomi yang saling berkaitan, posisi Wapres bisa menjadi salah satu titik penting dalam perebutan pengaruh

NASIONAL

Gelar Perkara Penyadapan Makar

Oleh Redaksi · 19 Nov, 07.50 WIB



TAK tampak persiapan khusus di kantor Bareskrim Polri, dekat Blok M Jakarta. Hari ini, Kamis, 19 November 2026, Bareskrim dijadwalkan menggelar perkara dugaan makar yang berkembang dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan banyak tokoh.Agenda ini patut mendapat perhatian serius. Sebab, penyidik akan memasuki tahap penting. Mereka akan menyusun kembali rangkaian peristiwa, menguji hubungan antarpelaku, menelusuri tujuan operasi, dan mencari dasar hukum untuk menghubungkan penyadapan dengan dugaan makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyebut gelar perkara akan melibatkan tim internal dan para ahli. Mereka akan membedah konstruksi perkara berdasarkan bukti dan keterangan ahli.

Tapi Susatyo juga menegaskan bahwa gelar perkara ini belum bertujuan menetapkan tersangka baru. Ini baru gelar perkara permulaan, yang tampaknya rumit karena melibatkan banyak pihak. Penyidik ingin menguji lebih dahulu seberapa kuat konstruksi hukum yang mereka bangun.

Pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sehari sebelumnya memberikan gambaran lebih luas. Ia menyebut hubungan antara penyadapan dan dugaan makar semakin nyata.

Penyidik telah menerbitkan SPDP untuk perkara makar, sementara sebagian besar rekaman percakapan dari telepon genggam pihak terkait sudah mereka amankan. Sebagian data komputer memang diduga telah dihapus. Penyidik kini mendalami rekaman dan bukti elektronik tersebut.

Yusril menghendaki gelar perkara mengungkap hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain, termasuk pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan menggunakan hasil penyadapan. Ia pernah bilang, “Wallahu a’lam bis shawab”, Allah yang lebih tahu, ketika ditanya otak intelektual penyadapan.

Melihat data pemeriksaan yang tersedia, ia bahkan membuka kemungkinan pemeriksaan berkembang ke luar lingkungan Polri, termasuk kalangan Politik dan birokrasi pemerintahan. Sasaran akhirnya jelas, itu tadi, menemukan aktor intelektual di balik operasi tersebut.

Penting mengingat bahwa Komisi III DPR telah lebih dahulu memberikan arah politik dan pengawasan terhadap perkara ini. Dalam rapat kerja dengan Kapolri pada 12 November, Komisi III menghasilkan dua kesimpulan yang ringkas namun tegas.

Pertama, mengapresiasi pengungkapan kasus penyadapan ilegal, dan meminta penanganannya berlangsung profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua, Komisi III secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan para tersangka merupakan tindakan makar dan meminta Kapolri menerapkan pasal makar serta mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Polri Bongkar Jaringan Narkoba Muzammil di Madura, Perputaran Uang Capai Rp 2,9 Triliun

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.50 WIB



BANDA ACEH -Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika Muzammil alias Semil yang beroperasi di Madura, Surabaya, hingga Kalimantan.

Jaringan ini diduga terhubung dengan jaringan internasional Indonesia-Malaysia dan beroperasi di wilayah Madura, Surabaya, hingga Kalimantan senilai Rp 2,9 triliun.

Dalam pengungkapan ini, petugas menangkap empat tersangka serta menyita aset ratusan miliar.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Kristian Parluhutan Siagian menjelaskan kronologi pengungkapan, dalam operasi yang berlangsung pada awal November 2026 di Bangkalan, Malang, dan Surabaya, petugas menangkap FA alias F yang berperan sebagai koordinator keuangan, J alias E sebagai koordinator gudang, MS yang diduga menerima sekaligus menyamarkan uang hasil narkoba, dan M alias S yang berperan sebagai pengedar dan pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap. FA alias F dan J alias E ditangkap pada 6 November 2026, kemudian MS pada 9 November 2026. Sedangkan M alias S ditangkap pada 11 November 2026 di Bangkalan, Madura.

"Tnggal 11 November 2026, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO tersangka M alias S di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Terhadap tersangka diketahui bahwa yang bersangkutan mendapatkan sabu dari seseorang atas nama GS yang warga negara India yang berada di Malaysia," kata Krist dalam jumpa pers di Bareskrim Polri pada Rabu malam, 18 November 2026.

Penyidik juga menelusuri aliran keuangan jaringan melalui CV AJ. Sebab, berdasarkan analisis PPATK, rekening yang terkait dengan perusahaan tersebut memiliki nilai transaksi sekitar Rp2,9 triliun selama 2018-2024.

"Berdasarkan laporan hasil analisa PPATK, perputaran uang pada rekening CV. AJ dalam kurun waktu 2018-2024 adalah sebesar Rp 2,9 triliun," jelas Krist.

Dari pengungkapam ini, Krist menyebut pihaknya mengamankan barang bukti berupa 5.244 butir pil ekstasi, senjata api, serta sejumlah barang bukti terkait TPPU.

NASIONAL

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.21 WIB



0leh:Rosadi Jamani

KITA kembali ke Raffi Ahmad yang dijuluki Sultan Andara. Bisa dikatakan, Aa Raffi mimpi anak di negeri ini. Kaya raya, punya istri dan anak soleh-solehah, populer, punya follower jutaan, masih muda jadi pejabat tinggi lagi.

Namun, hari ini reputasi itu mulai meredup. Netizen mulai menyoroti dari ujung rambut sampai ujung kaki.

Nasib suami Nagita Slavina ini sungguh mengharukan. Dulu setiap muncul di layar, orang tersenyum. Sekarang setiap muncul, netizen langsung mengeluarkan kaca pembesar.

Sultan Andara sedang mengalami pemeriksaan massal. Bedanya, pemeriksanya bukan BPK, BPKP, atau KPK, melainkan jutaan pasukan jempol.

Pemicunya Rp14.696.955.002. Menurut temuan ICW, ada delapan paket pengadaan jasa melalui PT RANS Animasi Indonesia. Lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 sekitar Rp3,9 miliar, sedangkan tiga paket dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025-2026 sekitar Rp10,8 miliar.

Begitu angka itu muncul, suasana media sosial berubah seperti pasar malam kebakaran. Guru honorer dipanggil, nelayan dibangunkan, beasiswa diajak rapat, BPJS disuruh hadir. Semua mendadak menjadi saksi.

Netizen bertanya, mengapa uang pajak dipakai untuk membayar influencer? Apa manfaatnya? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Jangan-jangan negara sudah kehabisan cara mempromosikan program sampai harus memanggil Sultan Andara.

Pandji Pragiwaksono ikut mengangkat persoalan ini lewat video "14M Untuk Raffi" pada 12 November 2026. Video berdurasi 17 menit 19 detik itu sudah ditonton sekitar 747 ribu kali pada 13 November, dengan 7,4 ribu suka dan 1,4 ribu komentar.

Belum selesai urusan APBN, netizen membuka lemari bisnis RANS. Ternyata isinya bukan cuma kamera, ring light, dan popok Cipung.

Pada 10 Juli 2026, RANS melantai di bursa melalui IPO dan menghimpun sekitar Rp429,25 miliar. Rencana bisnisnya mencakup wahana edukasi, konser, AI, hingga akuisisi perusahaan kosmetik.

LHKPN Raffi yang diumumkan Maret 2026 juga mencatat kekayaan bersih sekitar Rp1,146 triliun. Tanah dan bangunan Rp562,89 miliar, surat berharga Rp527,17 miliar. Netizen pun mulai menghitung. Kalkulator mereka mungkin sudah panas sampai perlu dikasih minyak kayu putih.

Kemudian jabatan Utusan Khusus Presiden ikut masuk meja pemeriksaan. Bukan berarti pejabat otomatis dilarang berbisnis. Namun, ketika perusahaan terafiliasi dengannya memperoleh kontrak pemerintah, transparansi dan potensi konflik kepentingan wajib diperiksa.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Mahfud MD Hitung Kerugian Prabowo Jika Pilih Dasco jadi Wapres

Oleh Redaksi · 19 Nov, 07.59 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai siapa pun wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak banyak memengaruhi efektivitas pemerintahan. Menurutnya, persoalan utama ada pada kinerja kabinet dan presiden. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026), saat membahas kemungkinan wapres berasal dari Partai Gerindra.

Pembahasan bermula dari pandangan Rizal. Ia menyebut dua nama yang ramai dibicarakan, Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono, sama-sama berasal dari Gerindra.

Menurut Rizal, jika salah satu terpilih, kritik publik kepada pemerintah akan makin langsung mengarah ke kubu Presiden Prabowo Subianto karena seluruh pucuk kekuasaan berada dalam "satu aras".

Mahfud tidak menanggapi premis itu secara langsung. Ia lebih dulu menyoroti soal Dasco, yang saat ini berperan besar di DPR.

"Kalau Pak Dasco masuk ke wapres, memang orkestrasi Politik yang ada di DPR itu akan melemah," kata Mahfud.

Ia mengakui kualitas kedua calon sama-sama baik, tetapi menilai peran lobi Dasco di parlemen sulit dijalankan dari kursi wakil presiden.

Soal efektivitas pemerintahan, Mahfud menegaskan faktor penentunya bukan wakil presiden. "Kalau efektivitas pemerintahan menurut saya bukan soal wakil presiden, itu soal kabinet yang memang hampir tidak berfungsi efektif semua pos," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jabatan wapres selama ini tidak banyak menentukan jalannya pemerintahan.

"Kita kan ini bicara wakil presiden, enggak terlalu banyak artinya bagi efektivitas pemerintahan. Selama ini juga ada Gibran, ya seperti ada dan tidak ada juga," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, persoalan yang lebih mendasar ada pada pengambilan kebijakan dan eksekusinya. Ia menyebut tiga tahun ke depan menjadi tugas Prabowo untuk membenahi hal tersebut.

"Tugas Pak Prabowo untuk memperbaiki agar negara ini berjalan, dan mungkin kegaduhan bisa diakhiri dari sekarang," ujarnya.

NASIONAL

Prof. Ryaas Rasyid: Mundur Jadi Cara Gibran Lolos dari Jerat Hukum

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.38 WIB



BANDA ACEH -Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukanlah cerminan sikap negarawan, melainkan upaya menyelamatkan diri dari jerat hukum.

Demikian pandangan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid melalui tayangan YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Prof. Ryaas menegaskan bahwa Gibran telah menipu rakyat Indonesia karena maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dengan dokumen yang tidak sah.

Mantan Menteri Otonomi Daerah ini menilsi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sudah batal demi hukum. Menurutnya, Gibran tidak memenuhi syarat konstitusional karena tidak memiliki ijazah setara SMA.

"Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya," kata Prof. Ryaas.

Ia membedakan kasus Gibran dengan mundurnya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurutnya, Gus Dur dan Soeharto mundur karena kebijakan Politik, bukan karena melanggar persyaratan konstitusi.

"Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat," kata Prof. Ryaas.

Di sisi lain, Prof. Ryaas menyoroti kelambanan DPR dan MPR dalam merespons putusan MK dan MA. Ia menilai DPR seharusnya segera melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran, bukan menerima pengunduran dirinya begitu saja.

"DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR," kata Prof. Ryaas.

Ia menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak menghapus status ketidakabsahannya.

"Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis," pungkas Prof. Ryaas.

NASIONAL

Ryaas Rasyid Desak DPR Lanjutkan Pemakzulan Gibran

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.33 WIB



BANDA ACEH -Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid mendesak DPR dan MPR untuk tetap melanjutkan proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, meskipun yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Penegasan ini disampaikan Prof. Ryaas melalui YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Menurut Prof. Ryaas, melanjutkan proses pemakzulan Gibran ini penting untuk membangun presiden konstitusional dan memberikan kepastian hukum.

"Harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Gibran dilantik oleh MPR, maka dia harus diberhentikan oleh MPR, bukan memberhentikan dirinya sendiri. Ini untuk membangun tradisi konstitusional," kata Prof. Ryaas.

Ia juga mendorong agar seluruh fasilitas negara yang melekat pada Gibran dicabut, seperti uang pensiun hingga pengawalan Paspampres.

"Kalau tidak sah secara konstitusi, berarti dianggap tidak pernah ada. Kalau diberi fasilitas, berarti diakui keberadaannya. Ini tidak boleh," kata Prof. Ryaas.

Prof. Ryaas mengajak seluruh elemen bangsa untuk lebih sensitif terhadap perilaku kekuasaan dan tidak membiarkan konstitusi dimanipulasi.

"Bangsa ini harus membangun peradaban baru yang menghargai kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai patokan dalam mengelola kekuasaan," pungkas Prof. Ryaas

NASIONAL

LSP Tak Mungkin Menyadap Presiden Prabowo untuk Dirinya Sendiri

Oleh Redaksi · 19 Nov, 08.29 WIB



BANDA ACEH -Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid buka suara soal kasus penyadapan yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Prof. Ryaas menolak kesimpulan bahwa LSP adalah satu-satunya pengguna hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, tidak masuk akal jika LSP menyadap Presiden tanpa kepentingan Politik.

"Sigit tidak punya ambisi politik. Dia tidak akan bisa jadi presiden. Jadi tidak mungkin dia menyadap presiden untuk dirinya sendiri. Pasti ada orang di atasnya. Dan orang itu tidak mungkin selain Jokowi," kata Prof. Ryaas Rasyid melalui YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Kamis 19 November 2026.

Ia menilai pernyataan Kapolri yang menyebut LSP sebagai satu-satunya pengguna adalah bentuk pengkhianatan terhadap upaya membuka kebenaran.

"Berhenti pada Listyo itu adalah pengkhianatan. Publik tidak bisa dipengaruhi dengan pernyataan itu. Publik punya logika sendiri," kata Prof. Ryaas.

Menurut Prof. Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Ia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan LSP.

"Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?" kata Prof. Ryaas.

Bagi Prof. Ryaas, persoalan ini bukan hanya menyangkut mantan Kapolri, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara dan lingkaran kekuasaan.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menutup perkara dengan membatasi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang, sementara kemungkinan adanya aktor lain belum diperiksa secara terbuka.

"Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran," kata Prof. Ryaas.

NASIONAL

Buntut Viral Tahanan Makan di Restoran, Kasat Narkoba Polres Asahan Diperiksa Propam Polda

Oleh Redaksi · 19 Nov, 10.57 WIB



BANDA ACEH - Video sejumlah tahanan kasus narkoba makan bersama anggota Satnarkoba Polres Asahan di restoran di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), viral di media sosial. Buntut kejadian tersebut, Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Asahan diperiksa di Polda Sumut.

Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi setelah konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Polda Sumut beberapa hari lalu. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Polres di wilayah Sumut.

Kasat Narkoba Polres Asahan disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. "Untuk Kasat Narkoba yang saat itu memimpin anggota polres untuk membawa tahana beserta anggota dan barang bukti sudah dilaksanakan pemeriksaan Selasa oleh Bid Propam Polda," ujar AKBP Adi Dharma, Rabu (18/11/2026).

Dia juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh video tersebut. Dia menegaskan, Polres Asahan tetap berkomitmen memberantas peredaran narkoba.

"Saya atas nama pribadi dan institusi Polres Asahan menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada masyarakat yang kecewa maupun menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan kepatutan dalam melaksanakan tugas kepolisian," ucapnya.

Sementara itu, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Pengamanan Internal (Paminal) Polda Sumut masih mendalami kejadian tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan anggota polisi dalam video viral itu

ACEH

7 BERITA

ACEH

IPS Aceh Barat Tembus 2,99, Raih Predikat Baik

Oleh Biro Meulaboh · 19 Nov, 20.07 WIB



Bupati Aceh Barat, Tarmizi, memberikan keterangan pers di tengah kesibukan dinasnya,FOTO/HAI

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat meraih nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 2,99 dengan predikat Baik berdasarkan hasil akhir Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan hasil evaluasi sebelumnya. Pada 2023, Aceh Barat memperoleh nilai 1,69 dengan predikat Cukup, kemudian meningkat menjadi 2,62 pada 2024 dan kembali naik menjadi 2,99 pada 2026.

Nilai tersebut juga melampaui target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Barat.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP., MM., menyebut capaian tersebut harus menjadi momentum untuk memperluas pembinaan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

Ia meminta agar pembinaan tidak hanya difokuskan pada OPD yang menjadi lokus penilaian, tetapi juga menjangkau 10 OPD lainnya yang dipersiapkan mengikuti EPSS 2028.

"Seluruh perangkat daerah harus mulai mempersiapkan tata kelola statistik sektoral sejak dini. Sepuluh OPD tersebut diharapkan mulai melakukan pembenahan agar pada 2027 sudah dapat mengikuti tahapan pembinaan dan penilaian sebagai persiapan menghadapi EPSS 2028," kata Tarmizi.

Bupati juga menginstruksikan Diskominsa selaku Walidata untuk memberikan pendampingan secara berkelanjutan, meliputi pemahaman indikator EPSS, penguatan tata kelola data, pemenuhan standar dan metadata, penyusunan bukti dukung, hingga pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, S.IP., M.Si., mengatakan peningkatan nilai IPS merupakan hasil kolaborasi antara Diskominsa dan perangkat daerah dalam memperbaiki tata kelola statistik sektoral.

Pada EPSS 2026, terdapat tiga perangkat daerah yang terlibat, yakni Diskominsa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat.

Dedi mengapresiasi komitmen kedua OPD yang menjadi lokus penilaian karena telah mendukung seluruh tahapan evaluasi.

Menurutnya, proses EPSS meliputi penilaian mandiri, pengumpulan dan pemeriksaan bukti dukung, penilaian dokumen oleh tim internal dan eksternal, serta klarifikasi dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan pelaksanaan di lapangan.

Ia menjelaskan, peningkatan nilai IPS tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menerapkan prinsip Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bapperida berperan sebagai Koordinator Data, Diskominsa sebagai Walidata, BPS sebagai Pembina Data, sedangkan seluruh OPD bertindak sebagai Produsen Data.

Dedi menegaskan, tantangan ke depan bukan sekadar melengkapi dokumen administrasi, melainkan memastikan standar dan tata kelola statistik sektoral benar-benar diterapkan secara konsisten oleh …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Satgas Operasi Zebra Seulawah Edukasi Pengemudi Angkutan Umum agar Tertib Berlalu Lintas

Oleh Redaksi · 19 Nov, 23.16 WIB



BANDA ACEH — Satgas Preventif Operasi Zebra Seulawah 2026 memberikan edukasi kepada para pengemudi angkutan umum agar senantiasa tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas. Kegiatan tersebut berlangsung di Terminal Penumpang Lhong Bata, Kamis (19/11/2026).

Edukasi ini dilakukan untuk mengingatkan para pengemudi agar tidak berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya sehingga berpotensi membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Petugas mengingatkan para pengemudi untuk mengutamakan keselamatan dan menghindari perilaku berkendara yang dapat memicu kecelakaan.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto mengatakan, kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dalam Operasi Zebra Seulawah 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Langkah ini bertujuan mewujudkan Kamseltibcarlantas di wilayah Aceh.

Joko mengatakan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan penekanan Kapolda Aceh saat apel gelar pasukan mengenai pentingnya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat guna membangun budaya tertib berlalu lintas.

Selain memberikan edukasi kepada pengemudi, Satgas Preventif juga mengintensifkan patroli serta mengoptimalkan kegiatan pengaturan dan penjagaan di jalur-jalur utama, termasuk titik rawan kemacetan dan kecelakaan.

Sebagai informasi, Polda Aceh bersama seluruh jajaran, didukung instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya, menggelar Operasi Zebra Seulawah 2026 selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Joko menegaskan, keberhasilan operasi tersebut tidak semata-mata diukur dari banyaknya penindakan atau jumlah tilang yang dikeluarkan. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari menurunnya angka pelanggaran, berkurangnya potensi kecelakaan, serta meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

“Semakin banyak masyarakat yang memahami, menyadari, dan mematuhi aturan lalu lintas, semakin besar pula keberhasilan upaya kita bersama dalam mewujudkan Aceh yang aman dan tertib,” demikian, pungkasnya.[]

ACEH

Uroe Lahee ke-70 Aceh Besar Digelar Sepekan, Panitia Siapkan Beragam Kegiatan Religius dan Sosial

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.30 WIB



ACEH BESA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kabupaten Aceh Besar tahun 2026 akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, olahraga, dan hiburan masyarakat.

Rangkaian peringatan yang dikemas dalam agenda Uroe Lahee ke-70 tersebut berlangsung selama tujuh hari, mulai 18 hingga 24 November 2026, dengan pusat kegiatan di Lapangan Bola Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Ketua Panitia Pelaksana Uroe Lahee ke-70 Kabupaten Aceh Besar, Abdullah, yang juga Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Besar Bidang Administrasi Umum, menyampaikan bahwa peringatan tujuh dekade Kabupaten Aceh Besar bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat kebersamaan, rasa syukur, serta refleksi perjalanan pembangunan daerah.

Dalam laporan panitia saat pembukaan, Rabu (18/11/2026) malam, Abdullah menjelaskan, pelaksanaan peringatan Uroe Lahee ke-70 berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang menyebutkan 24 November 1956 sebagai tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956.

Kegiatan tersebut juga mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 1400 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Besar ke-70.

Menurutnya, peringatan tahun ini memiliki makna penting sebagai momentum evaluasi dan refleksi bersama antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Aceh Besar yang berlandaskan syariat Islam serta kearifan lokal Aceh Rayeuk.

Berbagai agenda telah disiapkan untuk memperkuat identitas dan sejarah daerah, mempererat ukhuwah dan persatuan, melestarikan nilai agama dan budaya, mendorong kepedulian sosial serta ekonomi rakyat, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan sportivitas.

Salah satu kegiatan utama adalah lomba zikir maulid yang diikuti 20 kelompok perwakilan kecamatan se-Aceh Besar. Perlombaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19–20 November 2026 di lokasi utama Lapangan Bola Lubuk Sukon.

Selanjutnya, Musabaqah Dalail Khairat akan diikuti 20 kelompok dari dayah dan pesantren se-Aceh Besar pada 21–23 November 2026. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat syiar Islam serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap tradisi keagamaan.

Tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial dan keagamaan, panitia juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung kepada masyarakat. Di antaranya sunat massal dan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Aceh Besar selama 18–24 November 2026.

Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar turut menyelenggarakan festival anak, hafalan Juz Amma tingkat SD-SMP, lomba …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

DPMG Aceh Barat Perkuat Pengendalian Gratifikasi dan Integritas Aparatur

Oleh Biro Meulaboh · 19 Nov, 20.24 WIB



Kepala DPMG Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie L, M.Si., bersama narasumber dan peserta mengikuti kegiatan sosialisasi dan optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di

MEULABOH– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat menggelar sosialisasi dan optimalisasi peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk memperkuat komitmen aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kegiatan berlangsung di Aula DPMG Kabupaten Aceh Barat, Kamis (19/11/26), dan dibuka langsung Kepala DPMG Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie L, M.Si.

Dalam sambutannya, Marjan menegaskan pentingnya komitmen seluruh aparatur untuk membangun budaya kerja berintegritas serta menolak segala bentuk pemberian maupun penerimaan gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Inspektur Pembantu Khusus, Irwandi, S.E., CGCAE, mengenai optimalisasi peran UPG sebagai instrumen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya dalam pengawasan, sosialisasi, dan pengendalian gratifikasi.

Materi berikutnya disampaikan Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sekaligus Koordinator UPG Kabupaten Aceh Barat, Firman Dariyansah, SKM, M.Si. Ia membahas bentuk-bentuk gratifikasi, mekanisme pengendalian, serta pentingnya kepatuhan aparatur terhadap aturan guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

Melalui kegiatan ini, DPMG Aceh Barat berharap seluruh aparatur semakin memahami tugas dan fungsi UPG serta memiliki kesadaran untuk menolak gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan.

Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen DPMG Aceh Barat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan berintegritas.[]

Editorial: Biro Meulaboh.

ACEH

Pj Sekda Aceh Buka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Oleh Redaksi · 19 Nov, 15.11 WIB



BANDA ACEH — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, membuka Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Anjong Mon Mata, Kamis (19/11/2026). Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Dalam kesempatan tersebut, Taufik membacakan sambutan Gubernur Aceh sekaligus secara resmi membuka rapat koordinasi yang membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Dalam sambutan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah mendukung penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

Gubernur mengatakan, bencana tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kerusakan rumah, infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan mata pencaharian warga.

Meski berbagai upaya penanganan dan pemulihan telah menunjukkan perkembangan, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama. Di antaranya pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

“Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak,” ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028 agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal, sesuai kebutuhan daerah, serta mampu mempercepat pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.

Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan dan persoalan di lapangan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terpadu, dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai.

Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027. Pengalaman bencana sebelumnya diharapkan menjadi pelajaran untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor.

Dalam rapat tersebut, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, turut memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan pendanaan dan program lintas sektor, baik untuk pembangunan kembali infrastruktur maupun pemulihan kehidupan masyarakat.

Safrizal menyampaikan, sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah tuntas, sementara perbaikan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Di Samalanga, Dek Fadh Kenang Keteladanan Abon dan Pererat Silaturahmi Ulama

Oleh Redaksi · 19 Nov, 18.18 WIB



Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Haul ke-39 Tgk. H. Abon Abdul Aziz bin Muhammad Shaleh (Abon Samalanga) di Dayah Mudi

BIREUEN – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H. Fadhlullah atau akrab disapa Dek Fadh, menghadiri Haul ke-39 Tgk. H. Abon Abdul Aziz bin Muhammad Shaleh (Abon Samalanga) di Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga, Desa Mideun Jok, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Kamis (19/11/2026).

Kehadiran Dek Fadh menjadi wujud penghormatan atas jasa dan perjuangan Abon Samalanga dalam mengembangkan pendidikan Islam serta menjaga tradisi keilmuan dan syiar Islam di Aceh.

Pada kesempatan tersebut, Dek Fadh juga bersilaturahmi dengan Tgk. H. Sofyan Mahdi (Abon Arongan). Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus memperkuat hubungan antara Pemerintah Aceh dan kalangan ulama.

Dek Fadh menegaskan, ulama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai panutan umat, tetapi juga sebagai sumber nasihat dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan.

“Ulama merupakan pilar penting dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kehidupan masyarakat Aceh. Karena itu, silaturahmi dan sinergi antara ulama dan pemerintah harus terus kita rawat demi kemajuan Aceh,” ujar Dek Fadh.

Ia berharap, Haul ke-39 Abon Samalanga menjadi momentum untuk mengenang keteladanan ulama sekaligus meneruskan perjuangan, menjaga tradisi keilmuan, dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan.

Turut mendampingi Wagub Aceh, Karo Adpim Setda Aceh Akkar Arafat, Kepala Sekretariat MPU Aceh Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., serta Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Muhsin Thahir, S.Pd.I., M.Pd.I. Tgk. Muhsin.[]

ACEH

Buka Acara Uroe Lahee ke-70, Bupati Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Aceh Besar

Oleh Redaksi · 19 Nov, 12.32 WIB



ACEH BESAR – Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan, musyawarah, dan semangat gotong royong dalam melanjutkan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa kebersamaan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan Aceh Besar yang maju, bermarwah, bermartabat, serta berlandaskan syariat Islam.

Ajakan tersebut disampaikan Muharram saat membuka secara resmi peringatan Uroe Lahee ke-70 Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 di Lapangan Bola Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu (18/11/2026) malam.

Dalam sambutannya, Muharram mengatakan, peringatan 70 tahun Kabupaten Aceh Besar bukan sekadar perayaan bertambahnya usia daerah, melainkan momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.

Menurutnya, perjalanan panjang selama tujuh dekade telah membawa Kabupaten Aceh Besar melewati berbagai dinamika sejarah dan pembangunan. Karena itu, usia tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh elemen untuk terus berbenah dan menghadirkan perubahan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Peringatan Uroe Lahee ke-70 ini merupakan momentum kebangkitan dan kebersamaan kita semua,” kata Muharram dalam sambutannya menggunakan bahasa Aceh.

Ia menjelaskan, peringatan Uroe Lahee ke-70 tahun ini mengusung tema “Putoh Ngon Meupakat, Kuwat Ngon Meuseuraya: Menuju Aceh Besar yang Bermarwah, Bermartabat, dan Bersyariat dalam Bingkai Ahlussunnah wal Jamaah.”

Tema tersebut, kata Muharram, mengandung pesan mendalam tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan para indatu. Menurutnya, dalam membangun daerah, setiap keputusan besar harus dilandasi musyawarah dan mufakat, sementara berbagai tantangan pembangunan harus dihadapi melalui kebersamaan dan semangat gotong royong.

“Putoh ngon meupakat, kuwat ngon meuseuraya. Tidak ada keputusan besar yang dapat diambil tanpa musyawarah mufakat, dan tidak ada pekerjaan berat yang bisa diselesaikan tanpa semangat kebersamaan dan gotong royong,” jelasnya.

Muharram juga menekankan pentingnya persatuan antara umara, ulama, dan seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjaga marwah daerah serta menegakkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah.

Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus membangun sinergi dan memperkuat ikhtiar bersama demi mewujudkan Kabupaten Aceh Besar yang semakin maju dan berkembang. Perubahan, menurutnya, harus diciptakan melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen daerah.

Memeriahkan peringatan tujuh dekade tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah menyiapkan berbagai kegiatan selama 18–24 November 2026.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

9 BERITA

TEKNOLOGI

Gibran Rakabuming Raka Sibuk Main Game GTA VI Usai Mengundurkan Diri, Ini Kata Jokowi

Oleh Redaksi · 19 Nov, 16.44 WIB



BANDA ACEH -Gibran Rakabuming Raka Kamis (19/11/2026) resmi bermain game lagi setelah memutuskan mundur dari kursi Wakil Presiden RI.

Pria yang belum genap berusia 40 tahun itu rencananya akan bermain GTA VI yang rilis hari ini.

Sebelumnya kepastian Gibran akan bermain game online lagi diketahui usai sebuah akun parodi Kementerian Kegelapan mengajak Gibran main bareng (Mabar) GTA VI yang akan rilis sepekan dari pengunduran diri Gibran.

Akun tersebut mengajak Gibran Mabar di kolom komentar video pengunduran diri Gibran.

Ajakan tersebut kemudian disanggupi oleh Gibran.

“Sampai bertemu di server GTA Online, Mas” tulis akun Kementerian Kegelapan.

“Gas,” balas Gibran.

Akun itu memastikan 19 November 2026 akan Mabar GTA VI bersama Gibran secara perdana.

Sebagai informasi Rockstar Games resmi merilis Grand Theft Auto VI (GTA 6) pada Kamis (19/11/2026).

Di Indonesia, game ini sudah bisa dimainkan di PlayStation 5 (PS5) dan Xbox Series X/S mulai pukul 00.00 WIB, 01.00 WITA, atau 02.00 WIT.

Peluncuran ini mengakhiri penantian sekitar 13 tahun sejak Grand Theft Auto V (GTA 5) debut pada 17 September 2013.

Sejak debut pada 2013, GTA 5 hadir di beberapa generasi konsol.

Sementara itu ayah kandung Gibran, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu kegiatan Gibran usai mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden RI.

Bahkan Jokowi mengaku tidak tahu anaknya itu pulang ke Solo atau tidak.

Jokowi meminta awak media menanyakan langsung kepada putranya, termasuk mengenai kemungkinan Gibran kembali ke Solo.

“Tanyakan langsung ke Mas Gibran (rencana setelah mundur). Tanyakan langsung Mas Gibran aja (pulang ke Solo atau tidak),” terangnya seperti dimuat Tribunnews.com.

ASIA

Heboh! Putin Bawa “Tas Nuklir” ke KTT APEC di China, Ini Penampakannya

Oleh Redaksi · 19 Nov, 10.53 WIB



BANDA ACEH - Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi sorotan setelah rombongannya kedapatan membawa tas komando nuklir Rusia saat tiba di Shenzen, China, untuk menghadiri KTT APEC, Rabu (18/11/2026).

Tas yang dikenal dengan nama Cheget itu merupakan perangkat khusus yang digunakan untuk mengakses sistem komando kekuatan nuklir strategis Rusia. Perangkat itu memungkinkan pemimpin Rusia mempersiapkan dan memberikan otorisasi penggunaan senjata nuklir.

Kantor berita APA melaporkan, seorang ajudan yang mendampingi rombongan Putin blak-blakan mengatakan kepada wartawan Rusia, bahwa tas yang dibawanya merupakan Chegat.

Kemunculan tas tersebut langsung menarik perhatian karena Putin biasa membawanya dalam kunjungan luar negeri di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan rencana pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta Presiden China Xi Jinping. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan adanya perubahan status siaga nuklir Rusia.

Membawa Cheget dalam perjalanan kepresidenan merupakan bagian dari mekanisme rutin sistem komando nuklir negara tersebut.

Tas Nuklir Selalu Dibawa Putin ke Luar Negeri

Tas komando nuklir tersebut bukan pertama kali terlihat mendampingi Putin dalam perjalanan luar negeri.

Perangkat itu pernah menjadi perhatian saat Putin mengunjungi Beijing pada 18 Oktober 2023 untuk bertemu Xi Jinping.

Saat itu dua perwira Angkatan Laut Rusia berseragam terlihat membawa tas khusus saat mengikuti Putin berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan lain. Kamera wartawan bahkan sempat menyorot salah satu tas tersebut.

"Ada beberapa koper tertentu yang tanpanya tidak ada satu pun perjalanan Putin yang lengkap," tulis jurnalis kantor berita pemerintah Rusia, RIA, mengomentari rekaman tersebut

LAPANGAN PEKERJAAN

CPNS Guru 2026 Tanpa Afirmasi Usia, Pemerintah Batasi Pelamar Maksimal 35 Tahun

Oleh Van · 19 Nov, 23.09 WIB



Seorang wanita profesional berbagi inspirasi di ruang kerjanya yang penuh dengan penghargaan.

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan afirmasi atau perlakuan khusus terkait batas usia dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru tahun 2026.

Hal disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).

"Jadi sekali lagi untuk CPNS guru 2026 tidak ada afirmasi umur," kata Nunuk.

Ia menegaskan, rekrutmen tersebut dibuka bagi lulusan baru atau fresh graduate, terutama lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru.

Diketahui, pelamar wajib memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya berusia paling tinggi 35 tahun pada 2026.

Selain batas usia, calon pelamar juga harus memiliki sertifikat pendidik serta kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D4).

Dengan ketentuan tersebut, pelamar tidak mendapatkan pengecualian batas usia melalui kebijakan afirmasi khusus dalam seleksi CPNS guru tahun ini.

Nunuk mengungkapkan, formasi CPNS guru yang dibuka Kemendikdasmen pada 2026 diperuntukkan bagi tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Total kebutuhan yang disiapkan mencapai 1.460 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari 1.154 formasi guru dan 306 formasi tenaga kependidikan.

"Kalau yang di lingkungan Kemendikdasmen itu CPNS guru SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi. Formasinya sebesar 1.460 formasi," ujarnya.

Seluruh formasi tersebut akan diisi melalui seleksi terbuka secara nasional. Artinya, masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti proses rekrutmen selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

"Ini adalah seleksi terbuka secara nasional dan ini boleh diikuti siapa saja yang memenuhi syarat CPNS," ungkap Nunuk.

Formasi Guru Lainnya Juga Disiapkan

Selain untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, pemerintah juga berencana membuka kebutuhan guru melalui sejumlah program pendidikan lainnya.

Nunuk menyebutkan, terdapat formasi guru untuk SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Namun, pengelolaan rekrutmen tersebut berada di kementerian lain sehingga Kemendikdasmen belum memberikan rincian lebih lanjut.

"Jadi untuk saat ini peraturan yang dipakai untuk memenuhi CPNS untuk SNT maupun sekolah lain karena di luar SNT masih ada, sekolah umum Garuda, ada Sekolah Rakyat, dan ada CPNS guru yang lain," jelasnya.

Dengan demikian, calon pelamar yang berminat mengikuti CPNS guru 2026 perlu memperhatikan instansi tujuan, kualifikasi pendidikan, sertifikat pendidik, serta ketentuan batas usia.(*)

EDUKASI

Cetak Wirausaha Muda, PINBIS FEBI UIN Ar-Raniry Gelar Coaching Business Plan Batch 1

Oleh FEBI · 19 Nov, 12.15 WIB



BANDA ACEH – Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBIS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry menggelar Pelatihan Intensif Coaching Business Plan Batch 1, Rabu (18/11/2026).

Bertempat di Sophie's Sunset Library, kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan menyusun perencanaan bisnis yang matang, terarah, dan berdaya saing.

Mengusung tema "Dari Ide Menjadi Aksi, dari Rencana Menuju Peluang Bisnis", pelatihan ini diikuti oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Entrepreneur Club di bawah naungan PINBIS.

Kegiatan ini dirancang untuk mengubah gagasan kreatif menjadi rencana usaha yang terstruktur dan aplikatif.

Untuk memberikan perspektif yang praktis dan relevan dengan dunia usaha, PINBIS menghadirkan pelaku usaha secara langsung sebagai pembina.

Bang Anugerah, founder Kedai Kopi Barika, dan Kak Nur Raihan, founder Sophie's Sunset Library, mendampingi mahasiswa dalam sesi coaching.

Melalui pendampingan ini, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pasar, menentukan target konsumen, serta merancang model bisnis yang realistis.

Ketua Pembina PINBIS, Dara Amanatillah, M.Sc. Fin., menuturkan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan satu hari, melainkan bagian dari proses pembinaan kewirausahaan yang berkelanjutan.

"PINBIS FEBI UIN Ar-Raniry membangun rangkaian pendampingan secara bertahap. Tujuannya agar mahasiswa memiliki kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan ide, mengevaluasi strategi, dan mempersiapkan bisnis secara lebih komprehensif," ujar Dara.

Lebih lanjut, Dara menjelaskan bahwa proses coaching ini juga menjadi sarana untuk mengasah pola pikir kewirausahaan dan membangun keberanian mahasiswa dalam mengambil langkah bisnis.

Kolaborasi antara PINBIS FEBI, praktisi usaha, dan mahasiswa ini menjadi wujud sinergi nyata antara dunia akademik dan praktik bisnis.

Melalui kegiatan ini, PINBIS berharap dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, memperkuat kapasitas calon entrepreneur, serta mendorong lahirnya bisnis yang inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat.

LINGKUNGAN

39.687 Hektare Tutupan Hutan Aceh Hilang pada 2025, Bencana Ekologis Terus Berulang

Oleh Redaksi · 19 Nov, 21.38 WIB



Gambar ini menunjukkan area luas lahan yang telah dibuka di tengah hutan hujan lebat, memperlihatkan tanah berwarna kemerahan dengan pola terasering yang rumit. Kontras antara tanah terbuka dan hutan hijau di sekitarnya menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Kerusakan hutan Aceh menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dalam catatan satu tahun bencana ekologis.

Sepanjang 2025, Aceh disebut kehilangan tutupan hutan seluas 39.687 hektare atau meningkat sekitar 274 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Koordinator Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Riski, mengatakan kerusakan hutan tersebut menjadi salah satu persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama di tengah bencana ekologis yang terus berulang di sejumlah wilayah Aceh.

Dalam pernyataan sikap bertajuk *"Catatan Satu Tahun Bencana"* yang disampaikan di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026), Riski menyebutkan bahwa sebelum bencana melanda, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh telah berada dalam kondisi kritis.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin diperparah oleh kehilangan tutupan hutan dalam skala besar.

Ia menilai kerusakan kawasan hulu dan daerah aliran sungai tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebijakan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

"Semua ini bukan semata kehendak alam. Ini buah kebijakan yang mengobral izin eksploitatif tanpa menghitung daya dukung lingkungan," kata Riski.

Ia juga mengkritik pola penanganan bencana yang dinilai lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan hilir, sementara kerusakan hutan dan kawasan hulu belum mendapatkan penanganan menyeluruh.

"Namun yang dilakukan negara hanyalah membangun bronjong di hilir, sementara hulu yang rusak terus dibiarkan. Itu bukan pemulihan, itu tambal sulam atas kegagalan dan ketidakberdayaan mereka dalam mengelola negara," ujarnya.

Riski menilai, pemulihan pascabencana seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur darurat, tetapi juga menyasar akar persoalan kerusakan lingkungan.

Tanpa pemulihan kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah hulu, ancaman bencana ekologis dinilai akan terus membayangi masyarakat Aceh.

Ia mengingatkan, dampak bencana tidak hanya terlihat dari kerusakan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga dari hilangnya rasa aman serta terganggunya sumber penghidupan masyarakat.

Dalam pernyataannya, Riski turut menyinggung bencana yang kembali terjadi sepanjang November 2026.

Sedikitnya 13 kejadian tercatat di Aceh, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol dan merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang yang kembali mengungsi.

Sebanyak 37.566 jiwa disebut terdampak berbagai kejadian tersebut.

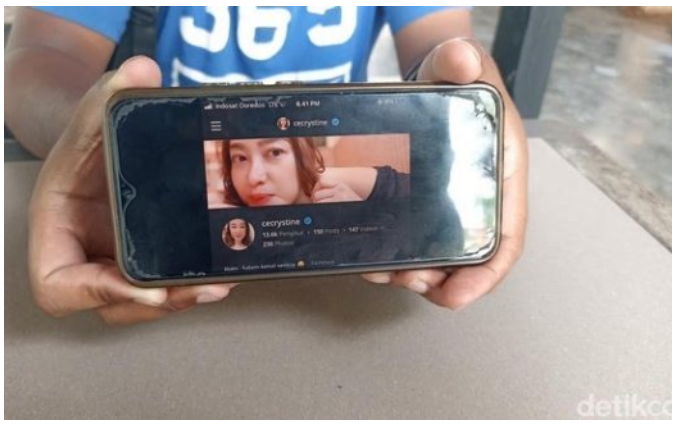
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

FULL Video Ce Crystine dan Suami Ada 3 Link File Berbayar?

Oleh Redaksi · 19 Nov, 11.11 WIB



BANDA ACEH - Perbincangan mengenai Ce Crystine, perempuan asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, semakin meluas di sejumlah platform media sosial. Pada Rabu (18/11/2026), kata kunci pencarian video lengkap yang dikaitkan dengan namanya kembali ramai digunakan oleh warganet, terutama di TikTok.Popularitas tersebut muncul setelah dirinya dikaitkan dengan perkara dugaan pembuatan dan pemasaran konten pornografi bersama sang suami. Situasi ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi, termasuk kabar mengenai tiga tautan yang diklaim berisi rekaman video Ce Crystine.

Meski banyak diperbincangkan, belum tersedia informasi terverifikasi yang membuktikan bahwa ketiga tautan tersebut benar-benar ada atau memuat video sebagaimana yang diklaim dalam unggahan media sosial.

Kasus Hukum Picu Popularitas Ce Crystine

Ce Crystine diketahui merupakan nama yang dikaitkan dengan perempuan berinisial K (38), warga Kabupaten Blitar. Ia menjadi perhatian setelah aparat kepolisian mengungkap dugaan keterlibatannya bersama suaminya, PEK (40), dalam aktivitas produksi dan penyebaran konten pornografi melalui internet.

Mengacu pada laporan detikJatim tertanggal 14 November 2026, pasangan tersebut diduga menjalankan kegiatan itu selama periode Maret 2025 hingga November 2026.

Keduanya akhirnya diamankan oleh petugas di sebuah rumah kos di Denpasar, Bali. Pengungkapan perkara ini bermula dari pemantauan aktivitas dunia maya yang kemudian dikembangkan menjadi penyelidikan oleh kepolisian.

Dugaan penggunaan layanan digital berbayar dalam menjalankan aktivitas tersebut turut membuat kasus ini menarik perhatian masyarakat.

Isu Tiga Tautan Video Belum Terverifikasi

Lonjakan pencarian nama Ce Crystine di TikTok, Instagram, dan X juga diikuti kemunculan berbagai unggahan yang menawarkan akses menuju video yang diklaim sebagai rekaman lengkap.

Sebagian akun menggunakan istilah seperti link original, video full, hingga tiga video terbaru untuk memancing rasa penasaran pengguna.

Akan tetapi, klaim tersebut belum didukung bukti yang bisa memastikan keaslian maupun isi tautan yang beredar. Oleh sebab itu, masyarakat sebaiknya tidak menganggap informasi mengenai tiga video tersebut sebagai sesuatu yang sudah terbukti.

Hati-Hati dengan Modus Phishing Berkedok Video Viral

Ramainya suatu topik di internet kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan tautan berbahaya. Pengguna yang tertarik dengan tawaran video gratis berisiko diarahkan ke situs palsu yang dirancang untuk mengambil informasi pribadi.

Beberapa modus yang perlu diwaspadai antara lain halaman masuk akun tiruan, permintaan mengunduh aplikasi tidak dikenal, hingga formulir yang meminta data sensitif.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

Cara Mempersiapkan Dana Darurat untuk Menghadapi Pengeluaran Tak Terduga

Oleh Arumka · 19 Nov, 11.00 WIB



Kelola keuangan Anda dengan bijak untuk masa depan yang cerah.

BANDA ACEH - Dana darurat merupakan salah satu fondasi penting dalam perencanaan keuangan pribadi maupun keluarga.

Meskipun membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya, kebiasaan menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin dapat membantu menciptakan rasa aman ketika menghadapi kondisi yang tidak direncanakan.

Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan dana darurat secara bertahap.

Pahami Fungsi Dana Darurat dalam Keuangan

Sebelum mulai mengumpulkan uang, penting untuk memahami perbedaan antara dana darurat dan tabungan biasa. Tabungan umumnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membeli kendaraan, membayar biaya pendidikan, atau merencanakan liburan.

Sementara itu, dana darurat hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Contohnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, dana darurat dapat membantu membiayai kebutuhan pokok selama mencari sumber penghasilan baru. Begitu pula ketika anggota keluarga membutuhkan perawatan medis mendadak, dana tersebut dapat digunakan tanpa harus mengorbankan anggaran kebutuhan lainnya.

Pemahaman ini membantu seseorang lebih disiplin dalam menjaga dana darurat agar tidak digunakan untuk keperluan konsumtif, sekaligus memastikan persiapan keuangan jangka panjang dan perencanaan warisan keluarga tetap berjalan sesuai tujuan.

Tentukan Target Dana Darurat Sesuai Kebutuhan

Langkah berikutnya adalah menentukan jumlah dana darurat yang ingin dikumpulkan. Besarannya dapat disesuaikan dengan pengeluaran bulanan, jumlah tanggungan keluarga, stabilitas pekerjaan, serta kondisi keuangan masing-masing individu.

Sebagai gambaran, seseorang yang masih lajang dapat menargetkan dana darurat sebesar tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan. Sementara itu, keluarga dengan anak atau beberapa tanggungan sebaiknya mempertimbangkan dana sebesar enam hingga dua belas kali pengeluaran bulanan.

Angka tersebut merupakan panduan umum yang dapat disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan keluarga.

Jika pengeluaran rutin mencapai Rp5 juta setiap bulan, target dana darurat untuk enam bulan adalah Rp30 juta. Jumlah tersebut lebih mudah dicapai ketika dibagi menjadi target bulanan yang realistis.

Evaluasi Pengeluaran Bulanan

Salah satu cara mempersiapkan dana darurat adalah memahami ke mana saja uang digunakan setiap bulan. Catat seluruh pengeluaran, mulai dari biaya makan, transportasi, tagihan listrik, cicilan, hingga kebutuhan hiburan.

Setelah mengetahui pola pengeluaran, kelompokkan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Biaya tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan pendidikan sebaiknya menjadi prioritas dibandingkan pembelian barang yang tidak mendesak.

Sisihkan Penghasilan Secara Konsisten

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EDUKASI

FEBI UIN Ar-Raniry Dorong Mahasiswa Lanjut Pendidikan ke Luar Negeri

Oleh FEBI · 19 Nov, 12.10 WIB



BANDA ACEH – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri melalui kegiatan Sharing Session "English Opens Doors".

Kegiatan tersebut digelar di Theater Room FEBI UIN Ar-Raniry, Kamis (19/11/2026), pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.

Sharing session ini menghadirkan dua alumni perguruan tinggi luar negeri. Mereka adalah dr. Nanda Ayu Puspita, M.Kes., Ph.D., alumni The University of Salford, Manchester, Inggris, yang kini dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dan Fahmi Yunus, S.E., M.S., Ph.D., alumni Southern New Hampshire University, Amerika Serikat, dan The University of Sheffield, Inggris, yang kini mengajar di FEBI UIN Ar-Raniry.

Diskusi dipandu Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App.Ec., M.Si., alumni The University of Adelaide, Australia, sekaligus dosen FEBI UIN Ar-Raniry.

Wakil Dekan III FEBI, Dr. Fithriady, Lc., M.A., saat membuka acara mengatakan, penguasaan bahasa Inggris menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa untuk menghadapi persaingan global.

"Bahasa Inggris tidak hanya untuk berkomunikasi. Tapi juga membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan lanjutan, dan jejaring profesional internasional," ujarnya.

Sementara Ketua Panitia yang juga Wakil Dekan I FEBI, Dr. Nevi Hasnita, M.Ag., mengatakan, kegiatan ini dirancang agar mahasiswa mendapat gambaran nyata tentang kuliah di luar negeri.

"Melalui pengalaman alumni, mahasiswa bisa memahami tahapan persiapan, tantangan, serta peluang yang bisa diraih dengan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan kesiapan akademik," kata Nevi.

Dekan FEBI, Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E., Ak., M.S.O.M., mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran alumni dengan pengalaman akademik internasional dapat memotivasi mahasiswa untuk membangun wawasan global.

Ia berharap mahasiswa mulai mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris sejak di bangku kuliah sehingga siap mengikuti berbagai program beasiswa dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi internasional.

Dalam sesi diskusi, para narasumber berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk proses adaptasi dengan lingkungan akademik internasional dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Melalui kegiatan "English Opens Doors", FEBI berharap mahasiswa semakin termotivasi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, memperluas wawasan internasional, dan mempersiapkan diri bersaing di tingkat global.

ISLAM

MagangHub Middle Class, Jembatan Harapan Pekerja Muda

Oleh rutyuyun · 19 Nov, 09.30 WIB



Poster ini menampilkan kolase visual pekerja muda yang sedang berdiskusi, suasana bursa kerja, dan teknisi industri di pabrik. Terdapat pesan utama mengenai solusi pengangguran melalui pelatihan kompetensi dan kesempatan kerja, dilengkapi dengan latar belakang Monas Jakarta. FOTO/AI for HAI.

SURABAYA - MagangHub Middle Class, Terobosan baru untuk menciptakan lapangan kerja bagi kelas menengah tengah (middle class) dipersiapkan oleh pemerintah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan.

Di tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, pengembangan berbagai industri berteknologi tinggi dipersiapkan, di antaranya otomotif.

Industri-industri berteknologi tinggi akan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan tinggi sekaligus upah tinggi.

Syahganda optimistis penciptaan lapangan kerja di bidang industri berteknologi tinggi dapat meningkatkan daya beli kelas menengah.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada generasi muda lulusan perguruan tinggi yang akan memasuki dunia kerja melalui program MagangHub.

Program MagangHub menurut Syahganda merupakan jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja.

Melalui pengalaman kerja nyata, pendampingan profesional, dan penguatan kompetensi, pemerintah berupaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Akar Masalah Pengangguran Sistem Kapitalisme

Jika kita telisik lebih mendalam, apa yang dimaksud Syahganda dengan maganghub untuk middle class hanyalah istilah baru namun konsep sama.

Dimana pemerintah hanya sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dan pencari kerja.

Kedua, pemerintah dan perusahaan sama-sama tidak bisa menjanjikan lowongan sebagai karyawan tetap.

Hal ini karena risiko perusahaan lebih kecil. Karena setiap 6-12 bulan akan mudah mendapatkan fresh graduate yang fresh from the oven.

Ketiga, meski dijanjikan gaji lebih tinggi, namun minimnya pengalaman tetap membuat perusahaan berpikir ulang untuk mempertahankan, perusahaan rentan mendapatkan dampak kehilangan produktivitasnya.

Keempat, bekerja bukan semata untuk memberi nafkah kepada keluarganya, tapi juga untuk meraih kesejahteraan.

Selain penetapan UMP/UMP dari pemerintah memberatkan perusahaan, kebutuhan hidup juga ikut naik.

Otomatis penghasilan pekerja terus digunakan hanya untuk bertahan hidup minimalis, ditambah pemerintah memungut pajak sepanjang tahun dan kepada si kaya dan si miskin.

Belum lagi dihadapkan pada kenyataan setelah 6-12 bulan bekerja kontrak tidak diperpanjang sehingga masa depan lebih baik semakin jauh di angan-angan.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa MagangHub bentukan Kemnaker memang berkontribusi nyata menyerap sekitar 46.000 tenaga kerja pada Batch 1. Peserta magang pun menerima uang saku dan jaminan sosial, secara konsep statistik mereka langsung dikategorikan sebagai "penduduk bekerja", yang turut andil menurunkan angka pengangguran nasional sebesar 77.000 orang per Agustus …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin